BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah pokok pendidikan yang selalu menjadi perhatian dari tahun ke tahun adalah mutu pendidikan, perluasan kesempatan pendidikan, relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat, dan efisiensi manajemen. Peningkatan mutu pendidikan misalnya menjadi komitmen Departemen Pendidikan Nasional (yang sejak tahun 2009 berubah nama menjadi Kementerian Pendidikan Nasional) yang ditunjukkan dengan dibentuknya Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK). Meskipun akhirnya direktorat ini dilebur bukan berarti masalah mutu dicuaikan tapi lebih difokuskan penanggung jawabnya. Sasaran restrukturisasi ini adalah untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya bagi kemajuan pendidikan di Indonesia serta meningkatkan kualitas pendidikan secara efektif dan efisien.

Dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yang merupakan unit pelaksana teknis pusat mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah termasuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA) atau bentuk lain di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan Nasional. Hal ini terdapat dalam pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.07 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

Pasal 3 lebih jelas menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas pada pasal 2 tadi, LPMP menyelenggarakan fungsi:

1. *pemetaan mutu pendidikan* dasar dan menengah termasuk TK, RA atau bentuk lain yang sederajat

2. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA atau bentuk lain yang sederajat
3. *supervisi satuan pendidikan* dasar dan menengah termasuk TK, RA atau bentuk lain yang sederajat dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional
4. fasilitasi sumber daya pendidikan terhadap pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA atau bentuk lain yang sederajat dalam penjaminan mutu pendidikan; dan
5. pelaksanaan urusan administrasi LPMP

Penentuan tupoksi ini baru diluncurkan pada tahun 2007 sehingga LPMP masih tetap mencari formula yang tepat untuk mengaplikasikan dan mengembangkannya sehingga penelitian tentang supervisi ini sangat dibutuhkan.

Diharapkan penelitian ini memberikan dasar pemikiran apa yang bisa dilakukan LPMP dalam menjalankan fungsinya dalam bidang pemetaan dan supervisi dalam rangka tugas penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah.

Selain itu, Surya Darma, Direktur Tenaga Kependidikan dalam majalah Forum Tenaga Kependidikan (2007:13) menyatakan bahwa mutu pengawas sekolah masih memprihatinkan sementara mereka mempunyai tanggung jawab yang berat baik aspek manajerial juga akademis. Sehubungan dengan keadaan tersebut, Direktoral Tenaga Kependidikan sudah menyusun tiga program besar sebagai usaha meningkatkan mutu tenaga kependidikan yakni: pengadaan, pengembangan, dan pemberian penghargaan dan perlindungan tenaga kependidikan (2007:15).

Kemudian, hasil penelitian atau kajian di LPMP Jambi (2008) juga menyimpulkan bahwa kompetensi pengawas dalam beberapa aspek masih rendah atau belum mencapai angka yang baik sehingga untuk menggapai standar mutu pengawas, beragam kompetensi mereka harus ditingkatkan.

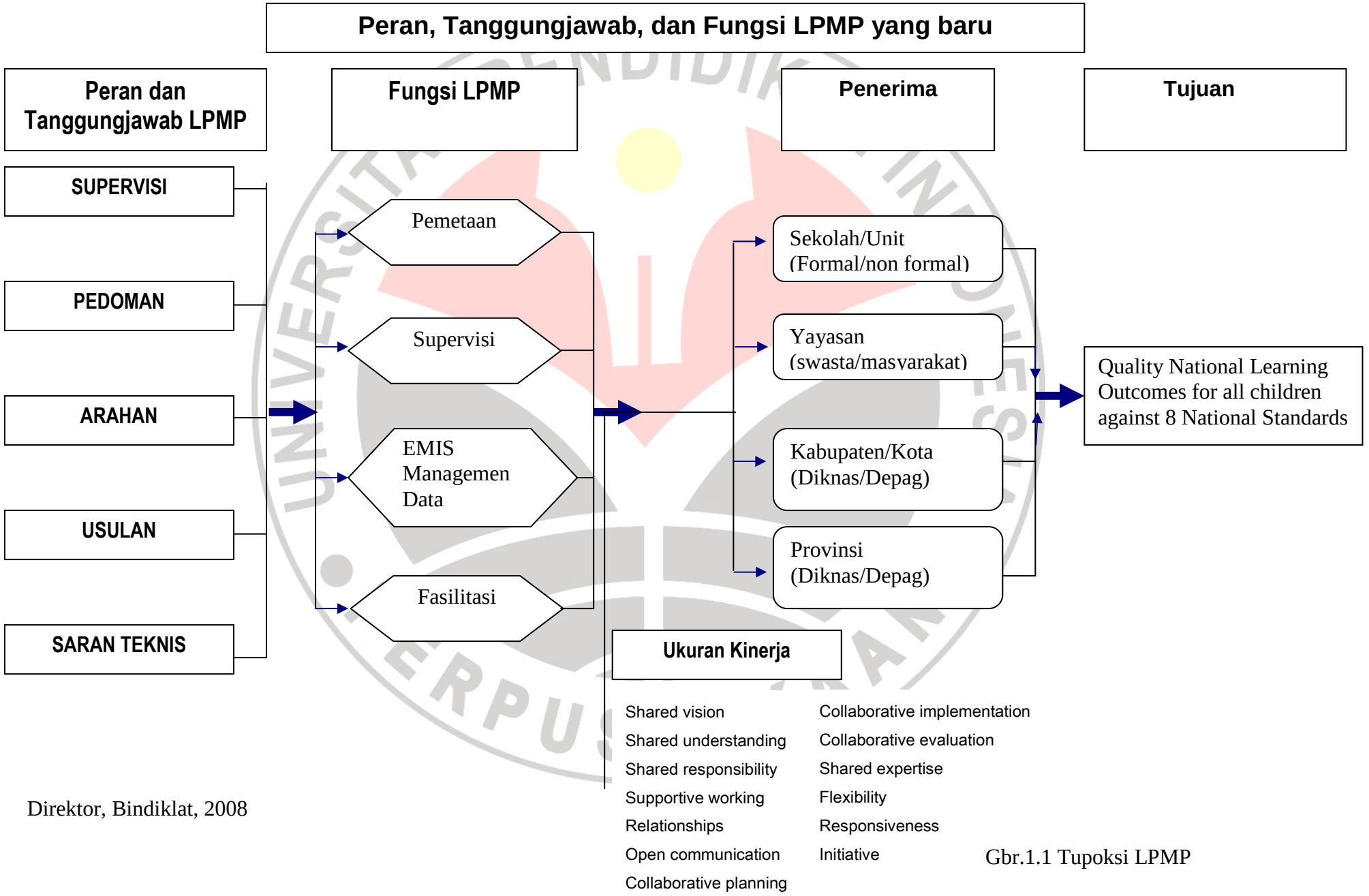

Direktor, Bindiklat, 2008

Gbr.1.1 Tupoksi LPMP

Kesimpulan itu diperkuat lagi dengan penjelasan Koordinator Pengawas Kota Jambi, Lilia Rudfa, pada bulan Desember 2008 tentang kondisi kepegawasan saat ini. Beliau menyatakan bahwa kinerja kepengawasan menghadapi beberapa kendala seperti persepsi yang tidak tepat akan status pengawas yang sering dianggap sebagai tempat mantan pejabat, mutasi (akibat sampingan otonomi, ketidak senangan), dan tempat orang-orang yang akan pensiun. Yang kedua adalah kurangnya dukungan sistem dari dinas pendidikan dan sekolah. Maksudnya pengawas kurang dilibatkan dalam proses menggapai mutu pendidikan. Pengawas sudah menyusun program pengawasan namun kebanyakan program itu tidak dilaksanakan atau hanya rencana tanpa implementasi. Hal lain adalah bahwa kompetensi, keahlian dan pengalaman pengawas yang tertinggal atau tidak lebih baik dari guru yang akan dibina. Pengawas juga tidak selalu dilibatkan dari awal dalam sosialisasi atau pelaksanaan kebijakan atau inovasi pembelajaran terbaru. Beliau juga berharap ada solusi terhadap kondisi itu dan dukungan LPMP Provinsi Jambi.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan LPMP terhadap PTK (pendidik dan tenaga kependidikan) pada tahun 2008, terlihat bahwa dari segi kualifikasi baru ada tujuh (7) orang atau 8% dari 84 pengawas Kota Jambi yang sudah mencapai S2 yang menurut Permendiknas No. 12 tahun 2007 merupakan syarat minimal seorang pengawas. Sedangkan jumlah pengawas SMA pada Maret 2010 adalah 12 orang yang bertugas membina 11 SMAN dan 26 SMAS. Dengan jumlah tersebut, pengawas harus mengoptimalkan kegiatan

supervisi agar bisa memperbaiki mutu pembelajaran atau proses belajar mengajar di 37 sekolah menengah atas.

Penelitian yang berhubungan dengan supervisi pendidikan yang dilakukan Musadirja (dalam Kustimi, 200:8) menyimpulkan bahwa kinerja kepala sekolah sebagai supervisor memberikan pengaruh positif yang besar dalam meningkatkan mutu pendidikan SMUN di Kota Bandung. Tesis Kustimi (2003) juga memperlihatkan kesimpulan yang senada akan kinerja kepala sekolah dan pengawas dalam membina kemampuan mengajar guru.

Hasil penelitian Rutter (dalam Corina, 2008) melaporkan bahwa jawaban atas pertanyaan sekolah mana yang bisa melahirkan siswa yang berhasil adalah sekolah yang memiliki ciri-ciri: menekankan pada pembelajaran, guru merencanakan bersama dan bekerja sama dalam pelaksanaan pembelajaran, dan adanya supervisi yang terarah dari guru senior dan kepala sekolah.

Lebih jauh, kajian tentang mutu pendidikan yang salah satu indikasinya adalah hasil Ujian Nasional, memperlihatkan bahwa mutu sekolah masih perlu ditingkatkan karena nilai-nilai yang dicapai oleh sekolah menengah atas di Kota Jambi tahun 2009 belum memuaskan juga untuk tahun ajar 2009/2010. Jadi untuk meningkatkan hasil belajar tersebut dibutuhkan upaya dari segala aspek termasuk supervisi akademis pada satuan-satuan pendidikan.

Alasan lain yang mendukung pentingnya topik ini adalah Asosiasi Pengawas Seluruh Indonesia (APSI) Jambi punya komunikasi yang baik dengan LPMP Jambi yang menyediakan satu ruangan di LPMP sebagai kantor

APSI Jambi. Diharapkan adanya hubungan dan kerjasama yang saling menguatkan antara LPMP dan APSI khususnya, serta dengan pelaksana dan pendukung supervisi lainnya (pengawas, kepala sekolah, Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten, Pemerintah Kota/Kabupaten, dan guru) dalam upaya meraih target atau standar serta mencapai mutu pendidikan yang lebih baik di Provinsi Jambi.

Menurut Permendiknas No.63 tahun 2009, mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional. Sedang secara umum, mutu pendidikan meliputi proses perbaikan yang secara umum bisa diaplikasikan pada aktivitas pendidikan apapun dan untuk membangun sebuah tatanan perilaku yang mendukung pencapaian mutu.

Harris (1975: 2) mengatakan bahwa perilaku supervisi merupakan sebuah bentuk khusus kepemimpinan (*a special form of leadership*). Perilaku supervisi terlihat dari semua operasi supervisi (*supervisory operasions*) berupa tugas (*tasks/goals*), proses (*processes/activities*) dan kompetensi (*competencies/prerequisites*) (Harris, 1975:11).

Harris (1975, 10-11) menggunakan istilah supervisi pendidikan (*supervision of instruction*) sebagai segala sesuatu yang dilakukan oleh pegawai sekolah terhadap orang dewasa maupun benda-benda untuk mempertahankan atau merubah operasi sekolah dengan cara yang langsung mempengaruhi proses pengajaran yang digunakan untuk memperbaiki pembelajaran siswa. Jadi untuk memperbaiki mutu pembelajaran, supervisi

merupakan salah satu cara yang harus ditempuh dengan memaksimalkan usaha sehingga mutu sekolah juga meningkat.

Dalam memperbaiki mutu pendidikan, dari aspek supervisi, perilaku supervisi baik dari kepala sekolah, pengawas, maupun guru-guru senior atau guru yang diberi tugas untuk mensupervisi seyogyanya ditingkatkan. Berkaitan dengan itu, penulis ingin mengetahui bagaimana gambaran aspek supervisi khususnya perilaku supervisi akademis baik dari kepala sekolah, pengawas, maupun guru-guru senior dan apakah mempengaruhi kinerja guru atau mutu pembelajaran dan efektivitas sekolah atau mutu sekolah menengah atas di Kota Jambi dan sejauh mana, sehingga bisa direkomendasikan program atau kegiatan untuk memperbaiki atau meningkatkannya.

Penelitian ini difokuskan pada supervisi akademis karena masih sangat sedikit yang meneliti di ranah ini padahal inti dari supervisi pendidikan adalah perbaikan akademisnya atau perbaikan pembelajarannya atau perbaikan perilaku guru dalam hal pembelajaran.

Terakhir, kenapa penulis memilih masalah ini sebagai fokus penelitian atau ingin mengetahui permasalahannya lebih rinci adalah karena belum ada penelitian sebelumnya yang mengkaji perilaku supervisi secara umum dan supervisi akademis secara khusus menghubungkan dengan LPMP sebagai bagian proses supervisi tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi di atas maka penulis ingin mengetahui bagaimana gambaran atau deskripsi perilaku supervisi akademis baik dari kepala sekolah, pengawas, maupun guru-guru senior dan apakah mempengaruhi kinerja guru atau mutu proses pembelajaran dan efektivitas sekolah menengah atas di Kota Jambi dan sejauh mana. Deskripsi hasil tersebut digunakan sebagai pemetaan mutu (*mapping quality*) pendidikan khususnya di kota Jambi yang akan ditindak lanjuti dengan program supervisi.

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka diajukan beberapa pertanyaan:

1. Bagaimana gambaran perilaku supervisi akademis kepala sekolah, pengawas, dan guru senior Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Jambi ?
2. Bagaimana gambaran tentang kinerja guru di Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Jambi?
3. Bagaimana gambaran efektivitas sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Jambi?
4. Bagaimana pengaruh perilaku supervisi akademis terhadap efektivitas sekolah?
5. Bagaimana pengaruh perilaku supervisi akademis terhadap kinerja guru?
6. Bagaimana pengaruh kinerja guru terhadap efektivitas sekolah?

7. Bagaimana pengaruh perilaku supervisi akademis dan kinerja terhadap efektivitas sekolah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan di atas; yakni:

1. Mengetahui gambaran tentang perilaku supervisi akademis dari pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru senior pada proses pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Negeri, Kota Jambi.
2. Mengetahui gambaran tentang kinerja guru di Sekolah Menengah Atas Negeri, Kota Jambi.
3. Mengetahui gambaran tentang efektivitas sekolah Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Jambi.
4. Menganalisis pengaruh perilaku supervisi akademis terhadap efektivitas sekolah.
5. Menganalisis pengaruh perilaku supervisi akademis terhadap kinerja guru.
6. Menganalisis pengaruh kinerja guru terhadap efektivitas sekolah.
7. Menganalisis pengaruh supervisi akademis dan kinerja guru terhadap efektifitas sekolah.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini berguna untuk:

1. Penambahan ilmu tentang perilaku supervisi akademis dan pengaruhnya terhadap kinerja guru dan efektivitas sekolah.
2. Rekomendasi untuk pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru senior bagi perbaikan dan penguatan perilaku supervisi akademis mereka.
3. Rekomendasi untuk pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/kota agar menyiapkan cara-cara atau program-program yang lebih baik dan tepat untuk penguatan perilaku dan proses supervisi akademis satuan pendidikan serta untuk peningkatan kinerja guru dan efektivitas sekolah.
4. Rekomendasi untuk LPMP agar lebih aktif berkolaborasi dengan pihak Dinas Pendidikan, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan dalam upaya-upaya penguatan perilaku supervisi akademis secara khusus dan perbaikan supervisi pendidikan secara umum.

   Dalam pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan No. 07 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan juga disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LPMP seharusnya berkoordinasi dengan unit-unit utama Dinas Pendidikan Nasional, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Perguruan Tinggi.

E. Asumsi

Berdasarkan beragam teori dan penelitian dapat dikatakan bahwa supervisi termasuk supervisi akademis mempengaruhi kinerja guru dan mutu pembelajaran karena tujuan dasar dilakukannya supervisi adalah untuk membantu guru memperbaiki mutu pembelajaran dan kinerja mereka sejak dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga target sekolah tercapai (efektif).

Beberapa asumsi yang disusun adalah bahwa:

a. Perilaku supervisi akademis yang mengedepankan unsur kemanusiaan akan lebih kuat memotivasi guru memperbaiki mutu proses pembelajaran atau *successful teaching* (Sergiovanni dan Sarrat, 1993:18 dan 21).
b. Perilaku supervisi akademis yang mengedepankan unsur kemanusiaan akan menghasilkan perbaikan sekolah (*school improvement*) atau efektivitas sekolah (Sergiovanni dan Starrat, 1993: 18).
c. Proses pembelajaran sebagai inti proses sekolah yang baik akan menghasilkan output sekolah (efektivitas sekolah) yang baik.
d. Jika perilaku supervisi akademis sebagai input dan kinerja guru dalam proses pembelajaran sebagai proses baik, maka efektivitas sekolah sebagai output juga akan baik.

F. Hipotesis

Untuk menjawab sementara pertanyaan penelitian di atas maka diajukan hipotesis:

a. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari perilaku supervisi akademis terhadap efektivitas sekolah.
b. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari perilaku supervisi akademis terhadap kinerja guru.
c. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kinerja guru terhadap efektivitas sekolah.
d. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari perilaku supervisi akademis dan kinerja guru terhadap efektivitas sekolah.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian deskriptif analitis, karena akan mengukur dan melihat bagaimana gambaran variabel dengan cara mencari rata-rata masing-masing dari tiga variabel yakni perilaku supervisi akademis, proses pembelajaran melalui kinerja guru, dan mutu sekolah melalui efektivitas sekolah. Kemudian diteliti korelasi antar variabel dengan menghitung koefisien korelasi untuk melihat apakah ada pengaruh dan arah pengaruhnya. Untuk melihat seberapa kuatnya pengaruh antar variabel, maka dicari dengan rumus regresi.

H. Lokasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Jambi dengan membatasi hanya Sekolah Menengah Atas Negeri se Kota Jambi yang berjumlah sebelas (11) sekolah. Yang akan dijadikan responden adalah semua Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan guru senior atau guru inti.

Data Jumlah Pengawas Provinsi Jambi tahun 2008 menurut Tugas Kepengawasan:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Data Pengawas

No.	Kab./Kota	Tugas Pengawas				Jumlah
		Pengawas MP	Pengawas PLB	Pengawas Rumpun MP	Pengawa TK/SD	
1.	Batanghari	2		9	20	31
2.	Bungo	10	2	16	43	71
3.	Merangin	2		14	50	66
4.	Tanjung Jabung Barat				1	1
5.	Kerinci	5	2	19	45	71
6.	Sarolangun					
7.	Muara Jambi	18	1		41	60
8.	Tebo		1		24	25
9.	Tanjung Jabung Timur				11	11
10.	Kota Jambi	**35**	2	17	30	84
Total		72	6	72	265	420

Tabel 1.2
Rekapitulasi Jumlah SMA Provinsi Jambi

No.	Kab./Kota	Negeri	Swasta	Jumlah
1.	Batanghari	9	2	11
2.	Bungo	16	5	21
3.	Merangin	15	4	19
4.	Tanjung Jabung Barat	11	6	17
5.	Kerinci	16	3	19
6.	Sarolangun	8	9	17
7.	Muara Jambi	10	5	15
8.	Tebo	11	2	13
9.	Tanjung Jabung Timur	11	3	14
10.	**Kota Jambi**	**11**	**26**	**37**

Sumber: LPMP Provinsi Jambi

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Konsep Penjaminan Mutu Pendidikan

1. Pengertian Mutu Pendidikan

Mutu memiliki pengertian yang bervariasi (Sallis, 2008: 49), dan dia menjelaskan mutu sebagai suatu konsep yang bisa absolut maupun relatif (2008: 51-55). Mutu yang dipahami sebagai sesuatu yang absolut mengarah pada mahal, mewah, cantik, baik dan benar, yang lebih tepat disebut '*high quality*' atau '*top quality*'. Jika dikaitkan dengan konteks pendidikan maka hanya sedikit institusi pendidikan yang dapat memberikan pengalaman pembelajaran dengan 'mutu tinggi". Sedangkan sebagai suatu konsep relatif, mutu dipandang sebagai sesuatu yang berasal dari produk atau layanan yang memenuhi spesifikasi atau standar yang ada. Sallis juga membagi definisi relatif menjadi dua aspek yakni 1) menyesuaikan diri dengan spesifikasi, dan 2) memenuhi kebutuhan pelanggan. Dia menyebutkan yang menjadi standar produk dan jasa adalah kesesuaian dengan spesifikasi, kesesuaian dengan tujuan dan manfaat, tanpa cacat (*zero defects*) dan selalu baik sejak awal. Standar pelanggan meliputi kepuasan pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan dan menyenangkan pelanggan (2008: 54-57).

Pengertian mutu pendidikan menurut Permendiknas No. 63 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 adalah *'tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional'*. Pengertian ini mengarahkan

bahwa mutu pendidikan di Indonesia akan bisa dicapai jika melaksanakan ketentuan dan ruang lingkup Sistem Pendidikan Nasional yang ada di Undang-undang No. 20 tahun 2003 yang salah satu penjabarannya adalah Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan antara lain definisi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan definisi-definisi istilah dalam ruang lingkup SNP (pasal 1) seperti: Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi (ayat 5), Standar Proses (ayat 6), Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (ayat 7), biaya pendidikan, KTSP, ujian, ulangan, evaluasi, akreditasi, BNSP dan LPMP. PP No.19 ini juga menjabarkan lingkup, fungsi dan tujuan SNP dan menjelaskan delapan (8) standar pendidikan.

PP No. 19 menjelaskan misalnya bahwa SNP adalah *kriteria minimal* tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1, ayat 1), SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (pasal 1, ayat 4), dan standar proses adalah standar pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (pasal satu, ayat 6). Ayat 22 misalnya menyebutkan bahwa Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan. Sementara Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) adalah unit pelaksana teknis Depdiknas di provinsi yang bertugas membantu Pemerintah Daerah dalam

bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, melalui berbagai program penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan (ayat 24).

SNP berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan (pasal 3), dan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional (pasal 4).

Selanjutnya pada pasal 19 ayat 1-3 tentang *Standar Proses* diterangkan bahwa proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik, dan dimana pendidik memberikan keteladanan. Setiap sekolah melakukan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Untuk pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut yang diperlukan (pasal 23).

Standar lain yang menjadi acuan *output* adalah SKL. Pasal 24 - 27 menguraikan bahwa SKL meliputi kompetensi mata pelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sekolah menengah umum, SKL bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak

mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut (pasal 26, ayat 2)

Secara umum mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari suatu barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu mencakup *input, proses, dan output pendidikan.*

Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumberdaya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsunnya proses. *Input* sumber daya meliputi sumberdaya manusia (kepala sekolah, guru termasuk guru BP, karyawan, siswa) dan sumberdaya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan, dsb.). *Input* perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, program, dsb. *Input* harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran- sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah. Kesiapan *input* sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu *input* dapat diukur dari tingkat kesiapan *input*. Makin tinggi tingkat kesiapan *input*, makin tinggi pula mutu input tersebut.

Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut *input* sedangkan sesuatu dari hasil proses disebut *output.* Dalam pendidikan berskala mikro (ditingkat sekolah), *proses* yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan

program, *proses belajar mengajar*, dan proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibanding dengan proses- proses lainnya. Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemaduan *input* sekolah (guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan dsb) dilakukan secara harmonis, sehingganya mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan *(enjoyable learning)*, mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik. Kata memberdayakan mengandung arti bahwa peserta didik tidak sekadar menguasai pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya, akan tetapi pengetahuan tersebut juga telah menjadi muatan nurani peserta didik, dihayati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan lebih penting lagi peserta didik tersebut mampu belajar secara terus menerus (mampu mengembangkan dirinya).

Output pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, ***efektivitasnya,*** produktivitasnya, efesiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya dan moral kerjanya. Khusus yang berkaitan dengan mutu *output* sekolah, dapat dijelaskan bahwa *output* sekolah dikatakan berkualitas/bermutu tinggi jika prestasi sekolah, khususnya prestasi belajar siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam : (1) prestasi akademik, berupa nilai ulangan umum EBTA, EBTANAS, karya ilmiah, lomba akademik, dan (2) prestasi non-akademik, seperti misalnya

IMTAQ, kejujuran, kesopanan, olah raga, kesenian, keterampilan kejujuran, dan kegiatan-kegiatan ektsrakurikuler lainnya.

Secara kajian makro, Bank Dunia dalam laporannya (2005: *Improving Education Quality*) menawarkan beberapa agenda perubahan untuk perbaikan pendidikan di Indonesia yakni: 1) menginvestasikan kapasitas (*invest in capacity*), 2) menggunakan MBS sebagai inti inisiatif reformasi (*adopt school-based management as the core of reform initiatives*), 3) mengembangkan sistem penjaminan mutu dan monitoring nasional (*develop a national quality assurance and monitoring system*), 4) memperbaiki mutu tenaga pendidikan melalui reformasi karir jangka panjang (*improve the quality of teaching force through career-long reform*), dan 5) merestrukrisasi kementrian pendidikan (*restructure the central ministry of education).*

David Hodkins dan Alma Harris (1997: 150) menyarankan bahwa diperlukan strategi berbeda untuk memperbaiki mutu sekolah yang berbeda, *"This would suggest that schools at different levels of effectiveness require different school improvement strategies."* Di bagian lain mereka menyimpulkan bahwa harus ada penyesuaian dalam hal strategi bagi perbaikan sekolah melalui strategi pengembangan sekolah sesuai kondisi perkembangan sekolah tersebut, "*…to adapt our strategies for school development according to the growth state of the individual school*." Mereka mengatakan lebih bahwa:

> *"Put simply, schools at different stages of development require different strategies, not only to enhance their capacity for development, but also to provide a more effective education for their students. Strategies for school*

development need to fit the growth state, or culture of the particular school."

Dikatakan bahwa sekolah-sekolah yang berbeda tingkat perkembangannya membutuhkan strategi-strategi berbeda, tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas untuk berkembang namun juga untuk memberikan pendidikan yang lebih efektif. Strategi bagi pengembangan sekolah harus cocok dengan perkembangan daerah dan budaya sekolah.

Mutu sekolah dipengaruhi oleh banyak tahapan kegiatan yang saling berhubungan seperti misalnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam konteks pengawasan mutu pendidikan, maka supervisi oleh pengawas satuan pendidikan antara lain kegiatannya berupa pengamatan secara intensif terhadap proses pembelajaran pada lembaga pendidikan, kemudian ditindak lanjuti dengan pemberian *feed back*. (Razik, 1995: 559)

Salah satu hasil/produk pendidikan adalah hasil ujian nasional (UN). Nilai UN merupakan sebuah ukuran mutu pendidikan. Indra Djati Sidi dalam bukunya Menuju Masyarakat Belajar (2001:71) menyebutkan beberapa indikator mutu pendidikan, yakni:

1). Hasil akademis (*Academic result*) : hasil ujian nasional (*national examination result*), Indeks Perkembangan Manusia (*Human Development Index*)

2). Hasil non-akademis (*Nonacademic result*): disiplin, moral, etika, kreativitas, dan kemandirian.

3). Kompetensi guru (*Teacher competence*): Hasil Uji Kompetensi (*Competence Test Result*).

Sementara Sallis dalam bukunya TQM in Education (2008) menjelaskan tentang mutu pendidikan dengan tinjauan manajemen. Mutu merupakan sebuah cara yang menentukan apakah produk terakhir sesuai dengan standar atau belum (2008:53). Dia melihat mutu pendidikan sebagai sebuah produk pelayanan, dan mengatakan bahwa karakteristik mutu pelayanan lebih sulit untuk dijelaskan. Namun mutu pelayanan yang jelek biasanya berkaitan dengan perilaku atau karakter pekerja (2008: 63). Dan perilaku tersebut disebabkan oleh kurangnya keinginan dan pelatihan. Jadi, ketika kita membicarakan mutu pendidikan, maka pembahasan tentang perilaku dan mutu pelayanan juga harus muncul.

Sallis (2008: 60) memberikan hirarki konsep mutu seperti berikut:

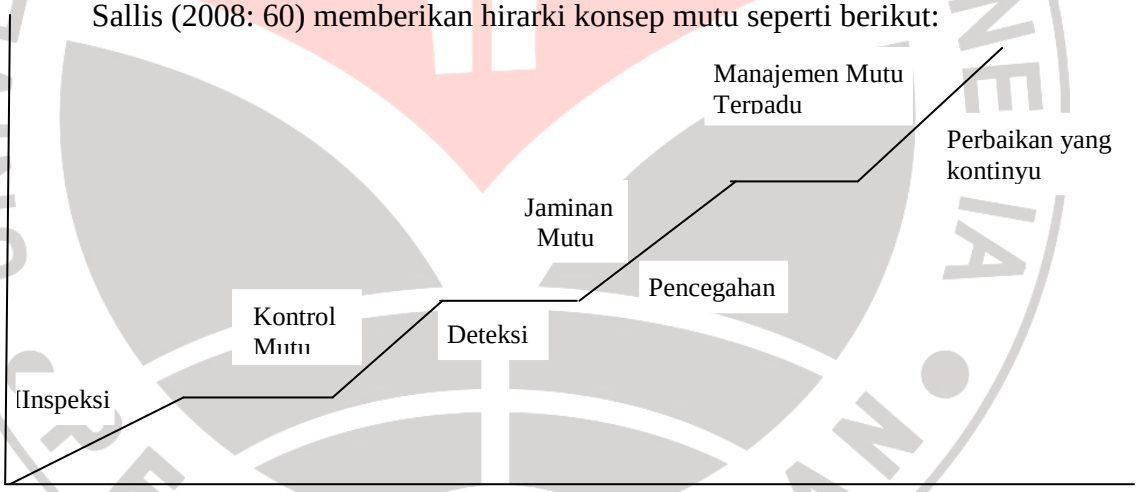

Gambar. 2.1 *Hirarki konsep mutu*

Sallis (2008: 62) melihat pendidikan sebagai sebuah jasa atau layanan bukan sebuah bentuk produksi, sehingga menilai mutu pendidikan berarti juga menilai mutu layanan yang sangat berbeda dari memeriksa hasil produksi pabrik.

Menurut Parasuraman (dalam Komariah, 2004:16), lima aspek yang menentukan mutu pelayanan (*service quality*), yakni:

a. *Tangibles*; berupa penampilan fisik, peralatan, personel, dan materi komunikasi.
b. *Reliability*; merupakan kemampuan untuk menyelenggarakan atau memberikan pelayanan dengan tepat dan terpercaya seperti yang dijanjikan.
c. *Responsiveness*; kemauan menyediakan layanan dengan cepat.
d. *Assurance,* adalah kapabilitas dan kesantunan personel dalam melayani sehingga pelanggan merasa yakin dan percaya dengan produk yang diberikan. Asssurance ini mencakup: kompetensi (*competence*), keramahan (*courtesy*), kepercayaan (*credibility*), dan keamanan (*security*).
e. *Empathy*; kepedulian dan perhatian terhadap pelanggan, yang terdiri dari mudahnya hubungan (*access*), baiknya komunikasi (*communication*), dan bagusnya pengertian dan pemahaman terhadap pelanggan.

Berdasarkan beragam penjelasan di atas, mutu sekolah dapat dilihat dari beberapa ukuran seperti produktivitas, efektivitas, prestasi akademis dan non akademis siswa, kompetensi guru, dan kepuasan pelanggan.

2. **Pengertian Penjaminan Mutu Pendidikan**

Jaminan mutu (*quality assurance*) menurut Sallis adalah suatu cara memperoleh produk yang bebas dari cacat dan kesalahan dan memenuhi spesifikasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jaminan mutu lebih menekankan tanggungjawab tenaga kerja dibandingkan inspeksi kontrol mutu, meski menurut Sallis inspeksi tersebut juga memiliki peranan dalam jaminan mutu (2009: 58-59).

Menurut Permendiknas No.63 tahun 2009, pasal 1 ayat 2, *penjaminan mutu pendidikan* adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.

Penjaminan mutu juga merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk pendidikan memenuhi standar yang sudah ditetapkan Depdiknas dan juga memastikan bahwa proses pendidikan di satuan organisasi penyelenggara pendidikan dapat diandalkan (SDM Bindiklat Ditjen PMPTK Depdiknas, 2008:1). Dan usaha penjaminan mutu pendidikan harus dilakukan secara sistematis, integral, menyeluruh dan berkelanjutan.

Dari beberapa pengertian tersebut bisa diambil beberapa kata kunci yakni kegiatan sistemik dan terpadu, meningkatkan kecerdasan, produk sesuai standar, dan proses pendidikan yang dapat diandalkan.

Untuk kepentingan penjaminan mutu, Depdiknas melalui Badan Standar Nasional Pendidikan sudah menyusun delapan (8) Standar Nasional Pendidikan dengan rincian sebagai berikut: Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian pendidikan.

Untuk melihat keberlanjutannya, tergambar dalam siklus penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang menurut PP No. 19 tahun 2005

terdiri dari empat (4) komponen utama yakni: standar, implementasi dan evaluasi, akreditasi, serta dukungan dan tindak lanjut.

Untuk komponen utama Dukungan dan Tindak Lanjut, disebutkan pada PP No. 19 tahun 2005 pasal 92 ayat (3), (4), (5), (6) dan (7) bahwa:

1) Pemerintah Provinsi mensupervisi dan membantu sekolah di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraan penjaminan mutu (ayat 3).
2) Pemerintah kabupaten/kota mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan program penjaminan mutu (ayat 4).
3) BAN-S/M, BAN-PNF, dan BAN-PT memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada sekolah yang diakreditasi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah (ayat 5).
4) LPMP mensupervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (ayat 6).
5) LPMP bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi (ayat 7).

Khusus untuk *tugas LPMP* dalam proses penjaminan mutu pendidikan adalah memastikan bahwa:

1. Pendidik memahami ruang lingkup *materi dan kompetensi* yang harus dicapai siswa yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan

silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu;

2. Pendidik melaksanakan *proses* pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan;
3. Pendidik mencetak seorang siswa yang mempunyai kualifikasi kemampuan *lulusan* yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
4. Pendidik dan tenaga kependidikan mencapai kriteria *pendidikan* prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan;
5. Pendidik dan tenaga kependidikan memahami *standar sarana dan prasarana* yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolah raga, tempat ibadah, perpustakaan;
6. Pendidik dan tenaga kependidikan memahami *standar pengelolaan* yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi penyelenggaraan pendidikan;
7. Pendidik dan tenaga kependidikan memahami *standar pembiayaan* yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun;

8. Pendidik dan tenaga kependidikan memahami *standar penilaian pendidikan* yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik.

Dalam pasal 2 ayat 2 Permendiknas No. 63 tahun 2009 juga dijelaskan tentang *tujuan antara* penjaminan mutu adalah: terbangunnya Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) termasuk:

a. terbangunnya budaya mutu pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal,
b. pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional dalam penjaminan mutu pendidikan bagi berbagai pihak,
c. ditetapkannya secara nasional acuan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan,
d. *terpetakannya secara nasional mutu pendidikan* se provinsi, kabupaten atau kota, dan satuan atau program pendidikan,
e. terbangunnya sistem informasi mutu pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan merata ke semua satuan pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah.

Dari uraian di atas terlihat bahwa penjaminan mutu pendidikan sudah menjadi perhatian pemerintah dan penanggung jawabnya sudah ditentukan termasuk Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). LPMP berkewajiban memastikan (*assure*) bahwa semua Standar Nasional Pendidikan dicapai oleh semua satuan pendidikan. LPMP mensupervisi dan membantu

satuan pendidikan dalam mencapai target pencapaian standar pendidikan tersebut. Tugas supervisi didahului dengan program pemetaan mutu yang juga merupakan kontrol mutu (*quality control*) terhadap satuan pendidikan.

Peningkatan mutu memerlukan rumusan pikiran tentang apa yang hendak ditingkatkan, memilih bagian yang paling dibutuhkan pelanggan, dan menghasilkan produk kegiatan yang paling unggul. Oleh karena itu, peningkatan mutu memerlukan ide baru yang datang dari pikiran cerdas, selalu mengandung bagian yang berbeda dari yang ada sebelumnya, menghasilkan bagian yang lebih sempurna, lebih bermanfaat, lebih mempermudah sehingga lebih diminati. Mutu memerlukan waktu, proses dan ketelatenan untuk mewujudkan ide-ide baru dengan baik sejak awal.

Tiap langkah dalam mewujudkan mutu memerlukan disiplin untuk selalu memenuhi seluruh persyaratan pekerjaan agar hasil yang diharapkan terwujud. Sebuah lembaga mutu yang baik membutuhkan disiplin bersama, tanggung jawab bersama, dan komitmen bersama.

Penerapan standar sebagai upaya meningkatkan mutu dan meningkatkan penjaminan mutu sewajarnya berimplikasi terhadap mutu pencatatan, tertib pengolahan, dan tertib sistem dokumentasi data.

Meningkatnya usaha penjaminan mutu perlu diikuti dengan semakin transparannya target mutu, alat ukur pencapaian target, pelaksanaan pengukuran, pengolahan data hasil pengukuran, penafsiran data, analisis tindak lanjut, dan dokumentasi juga.

Kriteria kinerja proses yang sekolah tetapkan bahwa pendidik wajib menyelenggarakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kolaboratif, eksploratif, elaboratif, dan konsfirmatif. Instrumen selanjutnya dibuat untuk mengetahui apakah pendekatan itu dipahami dan diterapkan pendidik di dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang paling sederhana penelusuran informasi itu menggunakan jawaban dengan alternatif ya dan tidak.

Usaha utama sekolah ialah mengubah visi dan misi menjadi aksi, melakukan langkah-langkah kecil dalam kegiatan sehari-hari serta memenuhi kriteria mutu yang ditetapkan. Indikator mutu lulusan menjadi pusat atau inti dari seluruh penyelenggaraan peningkatan mutu. Mutu lulusan menjadi patokan penyusunan program.

Mutu sumber daya yang dibutuhkan pada prinsipnya harus sesuai dengan kebutuhan dalam mewujudkan mutu lulusan. Dan sistem pemantauan harus berfungsi untuk memastikan bahwa kriteria mutu proses menjamin bahwa mutu lulusan yang diharapkan pasti terwujud.

Apabila kunci utama dalam penerapan standar adalah menentukan kriteria dan mengukur proses dan output maka sewajarnya sekolah menghimpun data yang terdokumentasikan. Profil input siswa dan keberhasilan sebelumnya yang sekolah capai, posisinya terhadap keberhasilan sekolah lain (*benchmark*) merupakan landasan penetapan mutu yang dicita-citakan. Oleh karenanya hasil evaluasi yang akurat sangat diperlukan dalam merumuskan target.

Mekanisme penerapan standar yang terstuktur mengelompokkan delapan komponen standar dalam *input, proses dan output***.** Kelompok *input* meliputi *standar isi, pendidik, sarana-prasarana, dan biaya*. *Proses* meliputi *standar pengelolaan, proses pembelajaran dan penilaian*. *Output* meliputi *standar kompetensi lulusan*. Sekolah yang efektif dapat mengalokasikan sumber daya input secara efisien sehingga menghasilkan output yang tinggi. Hasil penelitian para pakar menunjukkan bahwa proses yang baik sedari awal merupakan faktor utama yang menentukan mutu output. Itulah sebabnya menjadi mutu proses mejadi bagian penting dalam pengelolaan standar.

Aktivitas penerapan standar merupakan serangkaian komponen yang berinteraksi secara fungsional. Tugas sekolah adalah membangun keterkaitan antara komponen yang satu dengan komponen yang lain dalam sistem. Mekanismenya merupakan siklus dari elemen proses yang terintegrasi yang mengarah pada pencapaian tujuan. Prosesnya adalah mengubah sumber daya input menjadi sumber daya output.

3. Modeln-model Manajeme Mutu

Ada beberapa model manajemen mutu, namun penulis hanya menyajikan dua, dengan pemahaman yang lebih dekat atau bisa diaplikasikan dalam pendidikan.

a. TQM

Sallis (2008: 73) mendefenisikan Total Quality Management (TQM) sebagai sebuah konsep tentang perbaikan secara terus menerus, yang

menyiapkan alat praktis bagi institusi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelanggan. TQM berprinsip mengerjakan sesuatu dengan baik sejak awal, mengerjakan agenda yang diharapkan pelanggan, dan setiap orang dalam organisasi harus terlibat dalam upaya perbaikan terus menerus.

b. ISO

ISO merupakan organisasi standarisasi internasional (*international organization for standardization*) yang didirikan pada tahun 1947 dan berpusat di Genewa, Swis, yang memandang prinsip manajemen mutu (*quality management principle*) adalah ketentuan yang komprehensif dan mendasar untuk mengarahkan dan menjalankan organisasi yang bertujuan perbaikan kinerja terus menerus selama waktu tertentu dengan berfokus pada pelanggan.

> *"A comprehensive and fundamental rule or belief, for leading and operating an organization, aimed at continually improving performance over the long term by focusing on customers while addressing the needs of all stakeholders (kristerforsberg.com, 2009:2)."*

ISO menjalankan delapan prinsip manajemen mutu yakni:

1) berorientasi pada pelanggan (*customer-focused*); organisasi harus memahami kebutuhan sekarang dan mendatang dari pelanggan, permintaan mereka, dan berusaha memuaskan.
2) kepemimpinan (*leadership*); pimpinan harus mampu melibatkan semua orang untuk pencapaian target,

3) keterlibatan orang lain (*involvement of people*): semua orang harus terlibat mendayagunakan kemampuannya bagi keuntungan,
4) pendekatan proses (*process approach*); hasil yang diharapkan akan dicapai dengan efisien apabila sumber dan kegiatan diatur dalam sebuah proses.
5) pendekatan sistem (*system approach to management*); kegiatan identifikasi, memahami, pengaturan sistem yang diatur dalam sebuah proses akan memperbaiki efektivitas dan efisiensi.
6) perbaikan terus menerus (*continual improvement*); perbaikan terus menerus harus selalu ada dalam organisasi.
7) pendekatan (*factual approach to decision making*); semua keputusan akan efektif jika berbasiskan data dan informasi.
8) dan (*mutually beneficial suplier relationship*); prinsip saling menguntungkan.

Sekolah-sekolah di Indonesia sudah cukup lama mengadopsi prinsip-prinsip TQM, dan beberapa tahun terakhir sudah mulai mendapatkan sertifikat ISO sebagai tanda bahwa sudah menggunakan prinsip manajemen mutu dan pantas mendapat pengakuan pihak luar (eksternal).

B. Konsep Efektivitas Sekolah

Mutu pendidikan dapat dilihat dari kinerja sekolah yang dapat diukur dari kualitas, ***efektivitas,*** produktivitas, efesiensi, inovasi, kualitas kehidupan kerja dan moral kerjanya. Untuk penelitian ini pengukuran mutu pendidikan dilakukan dengan melihat efektivitas sekolah.

Efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran/tujuan (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dalam bentuk persamaan, afektivitas adalah sama dengan hasil nyata dibagi dengan hasil yang diharapkan. Sekolah efektif menunjukkan kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan. Abin (dalam Komariah dan Triatna, 2006:34) menegaskan bahwa efektivitas sekolah pada dasarnya menunjukkan tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai berupa *achievements* atau *observed outputs* dengan hasil yang diharapkan berupa *objectives, targets, intended outputs* sebagaimana yang telah ditetapkan.

Indonesia memiliki standar nasional yang bisa dijadikan acuan untuk mengukur efektivitas sekolah yakni Standar Kompetensi Lulusan yang terdiri dari SKL untuk Satuan Pendidikan (SKL-SP), Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP), dan Standar Kompetensi Mata Pelajaran SMA/MA seperti tertera dalam Permendiknas No. 23 tahun 2006. Untuk membatasi pembahasan maka penelitian ini baru menggunakan SKL-SP. Rincian SKL-SP adalah sebagai berikut:

1. Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) mencakup:
   1. SD/MI/SDLB/Paket A;
   2. SMP/MTs./SMPLB/Paket B;

3. SMA/MA/SMALB/Paket C;
4. SMK/MAK.

2. SKL-SP dikembangkan berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan seperti:

a. Pendidikan Dasar, yang meliputi SD/MI/SDLB/Paket A dan SMP/MTs./SMPLB/Paket B bertujuan: Meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

b. Pendidikan Menengah yang terdiri atas SMA/MA/SMALB/Paket C bertujuan: Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

c. Pendidikan Menengah Kejuruan yang terdiri atas SMK/MAK bertujuan: Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

Adapun Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) untuk SMA selengkapnya adalah:

1) Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan perkembangan remaja,
2) Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan diri serta memperbaiki kekurangannya,
3) Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, perbuatan, dan pekerjaannya,
4) Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial,
5) Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global,
6) Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, kritis, kreatif, dan inovatif,

7) Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan,
8) Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk pemberdayaan diri,
9) Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang terbaik,
10) Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah komplek,
11) Menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam dan social,
12) Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab,
13) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
14) Mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya,
15) Mengapresiasi karya seni dan budaya,
16) Menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun kelompok,
17) Menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani, serta kebersihan lingkungan,
18) Berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun,
19) Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat,
20) Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain,
21) Menunjukkan keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis,
22) Menunjukkan keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Indonesia dan Inggris,
23) Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan tinggi.

Pada sekolah efektif, seluruh siswa tidak hanya siswa yang memiliki kemampuan tinggi dalam belajar yang dapat mengembangkan diri, namun juga siswa yang memiliki kemampuan intelektualitas yang biasa pun dapat mengembangkan dirinya sejauh mungkin, apalagi jika dibandingkan dengan kondisi awal ketika mereka baru memasuki sekolah. Mortimore (dalam Komariah, 2006:35) mendefinisikan sekolah efektif sebagai *'one in which students progress further than might be expected from a consideration of intake'*. Harapan ini sedikit berbeda dengan kenyataan yang memfokuskan efektivitas sekolah pada penguasaan intelektual yang tercermin dari hasil nilai Ujian Nasional (UN), yang hanya menilai aspek intelektualitas, tanpa dapat mengukur hasil belajar siswa dalam kepribadian secara utuh.

Ciri-ciri sekolah efektif ditentukan oleh adanya aspek-aspek yang diperlukan dalam menentukan keberhasilan sekolah, seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Ciri-ciri Sekolah Efektif

CIRI-CIRI	INDIKATOR
Tujuan sekolah dinyatakan secara jelas dan spesifik	Tujuan sekolah: • Dinyatakan secara jelas • Digunakan untuk mengambil keputusan • Dipahami oleh guru, staff dan siswa
Pelasanaan kepemimpinan pendidikan yang kuat oleh kepala sekolah	Kepala sekolah: • Bisa dihubungi dengan mudah • Bersikap responsif kepada guru dan siswa • Responsif kepada orang tua dan masyarakat • Melaksanakan kepemimpinan yang berfokus kepada pembelajaran • Menjaga agar rasio antara guru/siswa sesuai dengan rasio ideal

Ekspektasi guru dan staf tinggi	Guru dan staf: • Yakin bahwa semua siswa bisa belajar dan berprestasi • Menekankan pada hasil akademis • Memandang guru sebagai penentu terpenting bagi keberhasilan siswa
Ada kerja sama kemitraan antara sekolah, orang tua, dan masyarakat	Sekolah: • Komunikasi secara positif dengan orang tua • Memelihara jaringan serta dukungan orang tua dan masyarakat • Berbagi tanggung jawab untuk menegakkan disiplin dan mempertahankan keberhasilan • Menghadiri acara-acara penting di sekolah
Adanya iklim yang positif dan kondusif bagi siswa untuk belajar	Sekolah: • Rapi, bersih dan aman secara fisik • Dipelihara secara baik • Memberi penghargaan kepada yang berprestasi • Memberi penguatan terhadap perilaku positif siswa Siswa: • Mentaati aturan sekolah dan aturan pemerintah daerah • Menjalankan tugas/kewajiban tepat waktu
Kemajuan siswa sering dimonitor	Guru memberi siswa: • Tugas yang tepat • Umpan balik secara cepat/segera • Kemampuan berpartisipasi di kelas secara optimal • Penilaian hasil belajar dari berbagai segi
Menekankan kepada keberhasilan siswa dalam mencapai keterampilan aktivitas yang esensial	Siswa: • Melakukan hal terbaik untuk mencapai hasil belajar yang optimal, baik yang bersifat akademis maupun nonakademis • Memperoleh keterampilan yang esensial Kepala sekolah: Menunjukkan komitmen dan mendukung program keterampilan esensial Guru:

	Menerima bahan yang memadai untuk mengajarkan keterampilan yang esensial
Komitmen yang tinggi dari SDM sekolah terhadap program pendidikan	Guru: Membantu merumuskan dan melaksanakan tujuan pengembangan sekolah Staf: • Memperkuat dan mendukung kebijakan sekolah dan pemerintah daerah • Menunjukkan profesionalisme dalam bekerja

Diadopsi dari Tola dan Furqon (dalam Komariah, 2006:38-39)

Sekolah efektif adalah sekolah yang fokus orientasinya adalah meningkatkan mutu dan melaksanakan pembaharuan berbasis data. Perkembangan sekolah selalu dimonitor sehingga membentuk sistem informasi perkembangan mutu belajar.

Sekolah efektif adalah sekolah yang dapat menerapkan prinsip-pinsip sekolah efektif dalam meningkatkan mutu proses sehingga berdampak pada peningkatan jumlah siswa yang mencapai prestasi akademik yang baik, atau sekurang-kurangnya tidak ada siswa yang menurun prestasinya. Sekolah efektif juga memiliki kepala sekolah dan guru yang efektif.

Kepala Sekolah yang efektif bertindak sebagai pemimpin yang mampu menggerakkan orang-orang dan mendorong organisasi untuk berkembang sehingga meraih keunggulan. Ia juga berperan sebagai manajer yang bertugas memastikan bahwa pembelajaran berlangsung efektif, dan mengukur hasil yang dicapai untuk dijadikan acuan bagi perbaikan-perbaikan mutu pada tahap selanjutnya.

Pada sekolah efektif memerlukan pendidik yang menguasai pengetahuan tentang materi pelajaran, pengetahuan pedagogis secara teoritis

dan praktis, pengetahuan kurikulum dan penerapannya, pengetahuan tentang siswa dan karakteristiknya, pengetahuan konteks pendidikan, serta pengetahuan arah, tujuan dan nilai pendidikan.

Sammons, Hilman dan Mortimore (1995) menyusun konsep sekolah efektif yang diimplementasikan oleh Pemerintah Victoria, Australia. Mereka menyatakan bahwa sekolah yang efektif adalah yang memiliki prinsip-prinsip: 1) *professional leadership*, 2) *focus on teaching and learning*, 3) *purposeful teaching*, 4) *shared vision and goals*, 5) *high expectations of all learners*, 6) *accountability*, 7) *learning communities*, 8) *stimulating and secure learning environment*, seperti digambarkan berikut: (http://www.education.vic.gov.au/about/directions/blueprint1/).

Gambar 2.2
Prinsip-prinsip Sekolah Efektif

Pemerintah Victoria melalui *Department of Education and Early Childhood Development* meyakini bahwa sistem sekolah yang bagus adalah yang dibangun atas prinsip sekolah efektif yang terus memperbaiki diri, ” *An*

excellent school system is one that is made up of effective schools *that are continuously improving."*

Jika sekolah menghadapi kendala meraih efektivitas maka perlu dikaji apa penyebabnya. Sallis (2008:103-106) mengemukakan beberapa penyebab kegagalan mutu berdasarkan hasil penelitian Deming yakni yang bersifat umum dan khusus. Penyebab umum adalah penyebab yang berhubungan dengan kegagalan sistem yang hanya bisa diatasi dengan merubah sistem, proses dan prosedur institusi, kemudian yang baru disusun, ditetapkan dan dikembangkan. Sedangkan sebab khusus lebih mengarah pada tidak ditaatinya prosedur atau aturan, salah komunikasi, salah paham, atau kurang skill, pengetahuan dan motivasi, sifat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang guru atau manajer pendidikan yang efektif. Tapi ketika terjadi kegagalan mutu, staf atau guru sering dijadikan kambing hitam, padahal kadang sebenarnya yang terjadi adalah kegagalan sistem. Jadi diperlukan identifikasi penyebab kegagalan mutu dengan tepat. Identifikasi masalah dapat dilakukan melalui *quality control* (QC).

C. Konsep Mutu Proses Pembelajaran dan Kinerja Guru

1. Mutu Proses Pembelajaran

Mutu proses belajar mengajar berarti kualitas ketercapaian tujuan dan target pembelajaran. Dalam Standar Proses, Bab V, bagian C tentang Evaluasi, dijelaskan bahwa untuk menentukan mutu pembelajaran dilakukan melalui evaluasi proses pembelajaran yang mencakup tahap: perencanaan proses

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara: a) membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan standar proses, dan b) mengidentifikasi *kinerja guru* dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru.

Untuk penelitian ini, mutu proses pembelajaran diukur melalui kinerja guru yang disesuaikan dengan Standar Proses dalam Permendiknas No. 41 tahun 2007 dan Standar Kompetensi Guru dalam Permendiknas No. 16 tahun 2007.

Bill Crech (dalam Komariah dan Triatna, 2004: 30) merekonstruksi lima pilar untuk membangun mutu yaitu: produk, proses, organisasi, pemimpin dan komitmen. Dijelaskan bahwa produk adalah titik pusat untuk tujuan dan pencapaian organisasi. Mutu dalam produk tidak mungkin ada tanpa mutu dalam proses. Mutu dalam proses tidak mungkin ada tanpa organisasi yang tepat. Organisasi yang tepat tidak ada artinya tanpa pemimpin yang memadai. Komitmen yang kuat merupakan pilar pendukung bagi semua pilar lain. Semua pilar saling menguatkan.

Dalam sistem persekolahan, lulusan merupakan titik pusat tujuan. Lulusan bermutu tidak mungkin terwujud tanpa proses pendidikan yang bermutu. Proses pendidikan yang bermutu tidak mungkin ada tanpa organisasi persekolahan yang tepat. Untuk memajukan organisasi yang tepat diperlukan pimpinan yang memadai, dan pemimpin itu sendiri harus mendapat komitmen dari seluruh perangkat sekolah atau konstituen.

Sekolah yang ideal memiliki perilaku sebagai sekolah belajar. Menurut Bovin (1999, dalam Komariah dan Triatna, 2004: 4) sekolah belajar memiliki perilaku sebagai berikut:

1. Memberdayakan sumber daya manusianya seoptimal mungkin;
2. Menfasilitasi warganya untuk belajar terus dan belajar kembali;
3. Mendorong kemandirian setiap warganya;
4. Memberikan tanggung jawab kepada warganya;
5. Mendorong setiap warganya untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjanya;
6. Mendorong adanya team work yang kompak dan cerdas serta berbagi dengan setiap warga;
7. Menanggapi dengan cepat pelanggan;
8. Mengajak warganya untuk menjadikan sekolahnya fokus pada pelanggan (customer focus);
9. Mengajak warganya untuk siap dan nyaman menghadapi perubahan;
10. Mendorong warganya untuk berfikir sistematis, baik cara berfikir, cara mengelola, maupun cara menganalisis sekolah;
11. Mengajak warganya untuk komitmen untuk ‘keunggulan kualitas’;
12. Mengajak warganya untuk melakukan perbaikan terus menerus;
13. Melibatkan warganya secara total dalam penyelenggaraan sekolah.

Sukses sekolah ditentukan oleh bagaimana kepala sekolah mengatur program sekolah seperti disampaikan oleh Sutisna (dalam Kustimi, 2002:7). Ia menyatakan bahwa mutu program pendidikan tidak hanya tergantung program

yang cerdas, namun juga pada personel pengajar yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk berprestasi. Jadi dibutuhkan pihak-pihak yang saling mendukung dan berkoordinasi termasuk personel/pihak yang memperbaiki mutu proses pembelajaran secara umum, dan pihak yang bertanggung jawab mensupervisi pembelajaran secara khusus.

2. Kinerja Guru

Kinerja atau *performance* dapat dimaknai sebagai prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja atau unjuk kerja (LAN, dalam Mulyasa, 2007: 136). Pendapat Smith (dalam Mulyasa, 2007: 136) menambahkan bahwa kinerja merupakan hasil dari proses, orang atau yang lainnya "…output *drive from processes, human or otherwise*".

Rivai dan Basri (dalam Saleh, 2009: 18) menjelaskan bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan selama periode tertentu yang dibandingkan dengan standar hasil kerja, target, sasaran atau kriteria yang sudah ditentukan atau disepakati.

D. Konsep Supervisi Pendidikan

1. Defenisi, Fungsi dan Obyek Supervisi Pendidikan

Supervisi memiliki beberapa pengertian tergantung dari sudut mana meninjau atau memahami. Kamus Pendidikan (The Dictionary of Education, dalam Goldhammer, 1980: 17) mendefinisikan supervisi dengan:

> *All efforts of designated school officials directed toward providing leadership to teachers and other educational workers in the improvement of instruction; involves the stimulation of professional growth and development of teachers, the selection and revision of education objectives, materials of instruction, and method of teaching, and the evaluation of instruction.*

Supervisi merupakan semua usaha yang ditujukan langsung untuk memberikan tuntunan kepada guru-guru dan petugas lainnya dalam rangka *memperbaiki pengajaran*; yang mencakup stimulasi untuk pertumbuhan dan perkembangan profesional guru, pemilihan dan perbaikan tujuan pendidikan, materi pengajaran, dan metode mengajar, serta evaluasi pengajaran.

Sementara Harris (1975, 10-11) menggunakan istilah supervisi pendidikan (*supervision of instruction*) sebagai segala sesuatu yang dilakukan

oleh pegawai sekolah terhadap orang dewasa maupun benda-benda untuk mempertahankan atau merubah operasi sekolah dengan cara yang langsung *mempengaruhi proses pengajaran* yang digunakan untuk memperbaiki pembelajaran siswa.

Dalam buku *Supervision for Today's Schools*, Oliva (1976: 6-7) menyatakan bahwa supervisi adalah proses membantu guru memperbaiki baik pembelajaran maupun kurikulum. Dia juga menegaskan bahwa supervisi dianggap sebagai sebuah *layanan* untuk guru baik individual maupun kelompok, dan merupakan sarana menawarkan *bantuan* spesial pada guru dalam memperbaiki pembelajaran. Menurut Oliva dua kata: layanan dan bantuan tersebut harus digaris bawahi.

Supervisi bagi Glatthorn (dalam Ang ,2007:) dijelaskan dengan istilah supervisi pendidikan (*educational supervision*). Supervisi pendidikan merupakan proses yang *didesain* untuk *memperbaiki pembelajaran* dengan membicarakan rencana pembelajaran dengan guru, mengamati pembelajaran, menganalisa, dan memberikan umpan balik. Jadi terlihat Glatthorn menjelaskan supervisi sebagai sebuah rangkaian tahap yang disiapkan dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta tindak lanjut.

Selain itu dalam buku Kimball Wiles, yang direvisi oleh John T. Lovel (1975: vii), supervisi pendidikan *(instructional supervision)* dimaknai sebagai sistem perilaku formal yang berinteraksi dengan sistem perilaku pengajaran untuk memperbaiki mutu pendidikan siswa. " *...an organizational behavior system that interacts with the teaching behavior system to improve the quality*

of education for students." Sistem bermakna bahwa supervisi tidak hanya mengacu pada perilaku supervisi tapi juga tempat 'total setting' dimana perilaku terjadi. Lovell memberikan tambahan:

> *...the instructional supervisory behavior system is as behavior officially designed by the organization which has the purpose of influencing the "teaching behavior sub-system' in such a way as to facilitate the achievement of goals of the teacher-pupil system"* (dalam Kimball, 1975: 5).

Sahertian (2000: 19) menyimpulkan bahwa fokus supervisi pendidikan ini adalah: perilaku supervisor (*supervisory behavior*), menolong guru (*helping teacher*), dan tujuannya adalah meningkatkan harapan belajar siswa (*the aim is to increase student learning hope*).

Husaini Usman dalam makalahnya dalam Jurnal Tendik (2008:8) membahas bahwa supervisi pendidikan merupakan fungsi yang ditujukan pada penjaminan mutu pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Supervisi akademik sama maksudnya dengan konsep supervisi pendidikan. *Educational supervision* sering disebut pula sebagai *instructional supervision* atau *instructional leadership*, yang menjadi fokusnya adalah mengkaji, menilai, memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan mutu proses pembelajaran yang dilakukan bersama dengan guru (perorangan atau kelompok) melalui pendekatan bimbingan dan konsultasi dalam nuansa dialog profesional. Dalam pendidikan, pengawasan merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya peningkatan prestasi belajar dan mutu sekolah. Sahertian (2000; 19) menegaskan bahwa pengawasan atau supervisi pendidikan adalah usaha memberikan layanan kepada *stakeholder* pendidikan, terutama kepada guru-

guru, baik secara individu maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki mutu proses dan hasil pembelajaran. Hakikat pengawasan pendidikan adalah upaya bantuan professional kesejawatan pengawas satuan pendidikan kepada *stakeholder* pendidikan terutama guru yang ditujukan pada perbaikan-perbaikan dan pembinaan aspek pembelajaran. Bantuan profesional yang diberikan kepada guru harus berdasarkan penelitian atau pengamatan yang cermat dan penilaian yang objektif serta mendalam dengan acuan perencanan program pembelajaran yang telah dibuat. Ofsted (2005) menyatakan bahwa fokus pengawasan sekolah meliputi: (1) standar dan prestasi yang diraih siswa, (2) kualitas layanan siswa di sekolah (keefektifan proses pembelajaran, kualitas program kegiatan sekolah, kualitas bimbingan siswa); dan (3) kepemimpinan dan manajemen sekolah.

Kegiatan supervisi dibutuhkan karena tidak semua guru yang dididik di lembaga pendidikan terlatih dengan baik dan kualified. Potensi sumber daya guru itu perlu terus dikembang agar dapat melakukan fungsinya secara optimal. Selain itu pengaruh perubahan yang serba cepat mendorong guru-guru untuk terus-menerus belajar menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta konsep dan kebijakan pendidikan.

Dari berbagai defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa supervisi adalah usaha membantu guru memperbaiki atau meningkatkan mutu pengajaran sehingga tujuan pendidikan tercapai dengan lebih baik. Supervisi pendidikan bermakna membantu dan melayani, berfungsi untuk mempengaruhi sikap dan situasi mengajar (*teaching behavior and situation*)

kepada siswa sehingga sebagai hasilnya (*learning outcome*) tercapainya peningkatan mutu pendidikan.

Namun Arikunto (2004: 5) membedakan supervisi berdasarkan kegiatannya yakni supervisi akademis dan supervisi administrasi. Supervisi akademis adalah supervisi yang menitikberatkan pada masalah dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan supervisi administrasi mengadakan pengamatan pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran. Supervisi yang melingkupi keduanya disebut sebagai supervisi pendidikan. Dalam kompetensi minimal pengawas disebutkan bahwa ada kompetensi supervisi manajerial dan kompetensi supervisi akademik selain kompetensi kepribadian, kompetensi evaluasi pendidikan dan kompetensi penelitian dan pengembangan.

Arikunto (2004:13) juga menyimpulkan bahwa ada tiga fungsi supervisi yakni 1) meningkatkan mutu pembelajaran, 2) memicu unsur yang terkait dengan pembelajaran, dan 3) membina dan memimpin.

Swearingen (dalam Sahertian, 2000: 21) mengemukakan delapan fungsi supervisi:

1) Mengkoordinasi semua kegiatan sekolah,
2) Melengkapi kepemimpinan sekolah
3) Memperluas pengalaman guru,
4) Menstimulasi kreativitas
5) Memberi penilaian yang teratur
6) Menganalisis situasi belajar mengajar

7) Memberi pengetahuan dan keterampilan

8) Memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi

Namun ada kendala yang harus dihadapi dalam melaksanakan supervisi pendidikan ini, seperti yang disampaikan oleh Sahertian (2000: 19) yaitu bagaimana merubah pola fikir yang bersifat otokrat dan korektif menjadi menjadi sikap yang konstruktif dan kreatif, suatu sikap yang menciptakan situasi dan relasi dimana guru-guru merasa aman dan diterima sebagai subyek yang bisa berkembang.

Purwanto (dalam Arikunto, 2004:21) menggambarkan beberapa prinsip supervisi yang harus diperhatikan: 1) Supervisi hendaknya bersifat konstruktif dan kreatif, 2) berdasarkan dana, 3) dilakukan dengan sederhana dan tidak kaku, 4) memberikan rasa aman, 5) terjalin hubungan yang profesional, 6) sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang disupervisi, 7) tidak mendadak, 8) tidak mencari-cari kesalahan, 9) memerlukan proses dan waktu, 10) bersifat preventif, korektif, dan kooperatif.

2. Teori-teori tentang Supervisi

Sergiovanni dan Starratt (1993:4) mengemukakan bahwa pengawas (supervisor) dan guru seringnya tidak menghubungkan kerja mereka dengan teori. Ketika profesional mengatakan mereka tidak teoritis, sebenarnya maksud mereka adalah tidak peduli dengan asumsi teori, acuan kerja dan sikap mereka. Malah Van Miller (dalam Sergiovanni dan Starrat, 1993:5), seorang pionir teori administrasi, menyatakan bahwa sulit mengurus dan mensupervisi sekolah tanpa teori. Dia menganalogkan dengan ‘monyet melihat monyet’, apa

adanya dan '*trial and error*'. Maksudnya seperti pengawas dan kepala sekolah melaksanakan tugasnya hanya melihat pengawas dan kepala sekolah yang lain tanpa berusaha mempelajari bagaimana sebaiknya atau teoritisnya atau bagaimana standar dan kriteria tugas dan fungsi mereka. Kemudian dalam bukunya Sergiovanni dan Starrat (1993:6) menggambarkan bagaimana teori bisa bermakna bagi praktek professional.

Practice → hunches → theories of practice → principles → practices

Pengawas dan guru lebih menyadari dan memahami dasar teori melalui praktek atau pengamalan mereka, lalu mereka bisa mengekspresikan teori tersebut, kemudian bisa secara teratur merevisi teori praktek ini sebagai hasil dari praktek sebenarnya yang mereka lakukan. Jadi selalu ada *perbaikan berkelanjutan* yang mengarah pada teori dasar dari profesional terkait.

Untuk kebanyakan pelaksanaan atau praktek supervisi berdasarkan pada beberapa pandangan umum (teori) tentang supervisi, yang sebagian tidak cocok lagi dengan kebutuhan dan kondisi supervisi saat ini. Teori-teori tersebut adalah:

(1). *Scientific management supervision* (Frederick Taylor, 1900an)

Dalam *scientific management supervision* yang diterapkan dalam supervisi pendidikan, guru dipandang sebagai pelaksana kurikulum dan sistem pengajaran dan supervisi dilaksanakan untuk memastikan guru mengajar dengan cara yang seharusnya dan mengikuti petunjuk dan protokol/peraturan pengajaran. Yang diutamakan dalam *scientific*

management supervision adalah kontrol, akuntabiliti, dan efisiensi. (dalam Sergiovani dan Starrat,1993:11-12).

(2). *Human relation supervision* (Elton Mayo, 1930an)

Mayo percaya bahwa produktivitas pekerja bisa meningkat jika dipenuhi kebutuhan sosial dalam bekerja, kesempatan berinteraksi dengan sesama, perlakuan yang sopan, dan keterlibatan mereka dalam memutuskan. Dalam pendidikan, guru lebih dipandang sebagai personal yang utuh, bukan hanya bagai seperangkat tenaga, keahlian, dan sifat, yang diperlukan dan dimanfaatkan administrator dan pengawas. Perasaan pribadi dan hubungan yang menyenangkan adalah dua kata kunci dari teori supervisi ini (dalam Sergiovani dan Starratt, 1993:12-13).

(3). *Neoscientific management supervision* (1980an)

Neoscientific management merupakan reaksi terhadap *human relations supervision. Neoscientific management* berbagi dengan manajemen tradisional dalam hal kontrol, akuntabilitas, dan efisiensi, namun lebih impersonal. Contohnya, ada keinginan yang diperbarui untuk memonitoring apa yang dikerjakan guru, apa materinya, dan metode mengajar yang mereka gunakan. Mereka sangat menitik beratkan pada dimensi tugas (*the task dimension*), kepedulian terhadap tugas (*concern of job*), kepedulian terhadap tujuan kinerja yang tinggi (*concern for highly specified performance objectives*). Para kritisi merasa ini terlalu kuat sehingga dimensi kemanusiaan menderita, dan kurang diterima guru (dalam Sergiovanni dan Starratt, 1993: 13).

(4). *Human resources supervision* (Chris Argyris dan lain-lain)

Kompetensi individu (*individual competence*), komitment (*commitment*), tanggung jawab pribadi (*self-responsibility*), individu yang berfungsi penuh (*fully functioning individuals*), dan organisasi aktif, mampu melakukan dan vital merupakan kriteria yang disampaikan Argyris berkaitan dengan human resources supervision (dalam Sergiovanni dan Starrat,1993:15).

(5). Normative supervision (Sergiovanni and Starratt)

Sergiovanni dan Starratt (1993:18-21) memberi nama *Normative Supervision* untuk praktek supervisi yang mengedepankan nilai dan norma seperti *professional values, community norms, care each other, help each other. Normative supervision* berdasarkan pada beberapa premis: 1) keinginan pribadi (*self-interest*) merupakan sumber motivasi, 2) kecendrungan (*preference*), nilai (values), emosi (*emotions)*, dan kepercayaan (*beliefs*) sama kuatnya dalam memotivasi guru dibanding bukti logis, beralasan dan ilmiah, dan 3) guru tidak mau menjadi individu yang tersisih (*isolated individuals*). Apa yang mereka pikirkan, percayai dan kerjakan dibentuk oleh keanggotaan mereka dalam kelompok dan hubungan dengan orang lain.

Dalam penelitian ini, hanya akan digunakan beberapa indikator *human resources supervision* dan *normative supervision* karena lebih cocok dan mendukung permasalahan tentang perilaku supervisi, yakni: 1) Motivasi, 2) Tanggung jawab, 3) Kompetensi, 4) Kreatifitas, 5) Komitmen, dan 6)

Kesabaran. Indikator-indikator tersebut disandingkan dengan dimensi kompetensi yang ada di dalam Permendiknas No. 12 dan 13 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah sehingga menjadi dasar untuk penyusunan instrumen untuk mengukur variabel penelitian ini yakni perilaku supervisi akademis.

Sergiovanni dan Starrat meyakini bahwa supervisi yang berhasil itu adalah yang keinginan diri sendiri (*self interest*) menjadi motivasi untuk melakukan supervisi. Senada dengan itu, G.R. Terry (dalam Kurniati, 2007: 16) mendefenisikan motivasi sebagai keinginan yang terdapat dalam individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan. Motivasi yang baik akan juga diikuti oleh perilaku yang lain seperti bertanggung jawab, jujur, kreatif, teguh dan sabar. Sedang As'ad (dalam Kurniati, 2007: 16) juga menyatakan bahwa motivasi kerja merupakan sesuatu yang menimbulkan semangat dan dorongan kerja. Motivasi merupakan pemberian atau penggerak yang menciptakan kegairahan seseorang untuk bekerja sama, efektif dan terintegrasi demi mencapai kepuasan.

Tanggung jawab merupakan perilaku yang sangat berhubungan dengan tugas yang ditentukan atau melekat pada diri seseorang sehingga dia berusaha mencapai target yang diharapkan. Pengawas sekolah dan kepala sekolah diamanahi tugas supervisi sudah sejak lama berdasarkan ketentuan dan peraturan sebelumnya, beberapa tahun terakhir ini dikuatkan dengan adanya Permendiknas yang mengatur standar minimal kompetensi mereka.

Kompetensi juga merupakan unsur perilaku supervisi yang menentukan apakah program atau kegiatan akan berjalan sebagaimana seharusnya atau tidak. Kompetensi supervisi akademis adalah kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan supervisi akademis seperti teknik supervisi, kompetensi mata pelajaran, kurikulum, penilaian, dan komponen lain yang mendukung bagi perbaikan mutu pembelajaran.

Pelaku supervisi juga diharapkan berperilaku kreatif karena tuntutan keadaan yang selalu berubah dan berkembang. Pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru yang diangkat untuk membantu memperbaiki mutu pembelajaran diharapkan membuat program bagi pengayaan kompetensi profesional pelaku supervisi akademis.

Dalam komitmen menandakan keteguhan seseorang memegang janji atau keteguhan sejak awal dan tidak gampang berubah. Supervisi yang diiringi komitmen semua pihak pelaku supervisi akan berjalan lancar dan bermanfaat, demi memperbaiki mutu.

Kesabaran merupakan komponen pengunci dan penguat bagi terlaksananya tanggung jawab supervisi yang berhubungan dengan proses dan output kegiatan supervisi ini. Semua komponen mengarah pada bagaimana perilaku pendidik dan tenaga kependidikan mencapai target atau memenuhi standar minimal.

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki perasaan, kebutuhan, pikiran dan motivasi. Kebutuhan akan mendorong motivasi untuk memenuhi apa yang dibutuhkannya yang mungkin harus dengan bekerja keras, tekun

ataupun dengan sabar. Maslow (dalam Kurniati, 2007: 17-20) menggolongkan kebutuhan manusia pada 5 hal yakni: 1) kebutuhan fisik, 2) kebutuhan akan keamanan dan keselamatan, 3) kebutuhan afiliasi (diterima, dihormati, sukses, ikut serta), 4) prestise/status, dan 5) kebutuhan aktualisasi diri. Jadi ketika kebutuhan tersebut bisa dipenuhi atau didapatkan, maka diharapkan manusia bisa mencapai titik optimal kerjanya termasuk juga pelaksana supervisi pendidikan seperti pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru senior.

3. Supervisi sebagai sebuah gerakan moral

Sergionanni dan Starratt (1993:52) juga menawarkan melihat kegiatan supervisi sebagai suatu gerakan moral (*moral action*). Dia mengatakan bahwa supervisi sebagai gerakan moral bisa dipahami sebagai sebuah usaha pihak pengawas berpartisipasi dalam komunitas agen moral, masing-masing berusaha melaksanakan hal yang benar, *'the right thing'*, sesuai nilai-nilai tertentu, sesuai dengan apa yang diharapkan atau bagaimana seharusnya manusia.

Mereka (Sergiovanni dan Starratt, 1993:55) melihat pengajaran sebagai sebuah aktivitas moral (*moral activities*) dan supervisi ikut serta dalam kualitas moral (*moral qualities*). Supervisi diharapkan mendukung, mengasuh, menguatkan cita-cita moral yang ditanamkan dalam pengajaran. Supervisi sebagai aktivitas profesional sangat terikat pada kepakaran ilmu (*knowledge expertise*) dan tanggung jawab moral (*moral responsibility*) dari profesi mengajar.

4. Perilaku Supervisi

Jika Harris (1975:2) mengemukakan perilaku supervisi (*supervisory behavior*) sebagai bentuk khusus kepemimpinan (*special form of leadership*) yang berhubungan dekat tapi berbeda dengan kepemimpinan administratif (*closely related to but distinct from administrative leadership*), Lovell (1975:6) menyatakan bahwa:

> *"Instructional supervisory behavior is assumed to be an additional behavior system formally provided by the organization for the purpose of interacting with the teaching behavior system in such a way as to maintain, change, and improve the provision and actualization of learning opportunities for students."*

Perilaku supervisi pendidikan disini dimaknai sebagai sistem perilaku tambahan yang secara formal diberikan organisasi yang bertujuan untuk berinteraksi dengan sistem perilaku mengajar, yang berguna untuk menjaga, merubah dan memperbaiki kesempatan belajar siswa.

Di Indonesia, perilaku supervisi berdasarkan pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, khususnya yang dijabarkan dalam Permendiknas No.12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah dan Permendiknas No. 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah.

Selanjutnya, untuk lebih mendalami tentang perilaku dan menguatkan supervisi sebagai sebuah gerakan moral, konsep perilaku bisa digunakan sebagai tambahan pandangan. Kurt Lewin (dalam Azwar, 2005: 10-11) memformulakan model hubungan perilaku (*behavior relation model*) dengan menjelaskan bahwa perilaku (behavior, B) merupakan fungsi karakteristik individu (personal, P) dan lingkungan (E, environment) sehingga:

B = f (P, E).

Karakteristik individu (P) mencakup beragam variabel seperti motif, nilai-nilai, sifat kepribadian, dan sikap yang saling berinteraksi satu sama lain dan kemudian berinteraksi pula dengan fakto-faktor lingkungan dalam menentukan perilaku. Faktor lingkungan memiliki kekuatan besar dalam menentukan perilaku, bahkan kadang-kadang kekuatannya lebih besar dari karakteristik individu.

Selain itu, untuk bisa memprediksi perilaku, Ijek Ajzen dan Martin Fishbein (dalam Azwar, 2005: 11-12) mengemukakan Teori Tindakan Beralasan (*theory of reasoned action*).

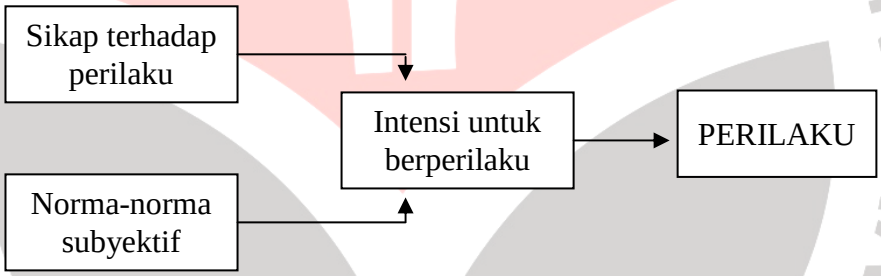

Gambar 2.3 Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action*)

Teori Tindakan Beralasan mengatakan bahwa sikap mempengaruhi perilaku lewat suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan, dan dampaknya pada tiga hal. Pertama, perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum tapi oleh sikap yang spesifik terhadap sesuatu. Kedua, perilaku dipengaruhi tidak hanya oleh sikap tapi juga oleh norma-norma subyektif yaitu tentang keyakinan mengenai apa yang orang lain inginkan kita perbuat. Ketiga, sikap terhadap suatu perilaku bersama norma-norma subyektif membentuk suatu intensi atau niat untuk berprilaku tertentu. Secara sederhana

teori ini mengatakan bahwa seseorang akan melakukan suatu perbuatan apabila ia memandang perbuatan itu positif dan bila ia percaya bahwa orang lain ingin agar ia melakukannya.

Teori Perilaku Beralasan itu kemudian diperluas dan dikembangkan oleh Ajzen (dalam Azwar, 2005: 12-13) yang dinamai Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) seperti digambarkan di bawah ini:

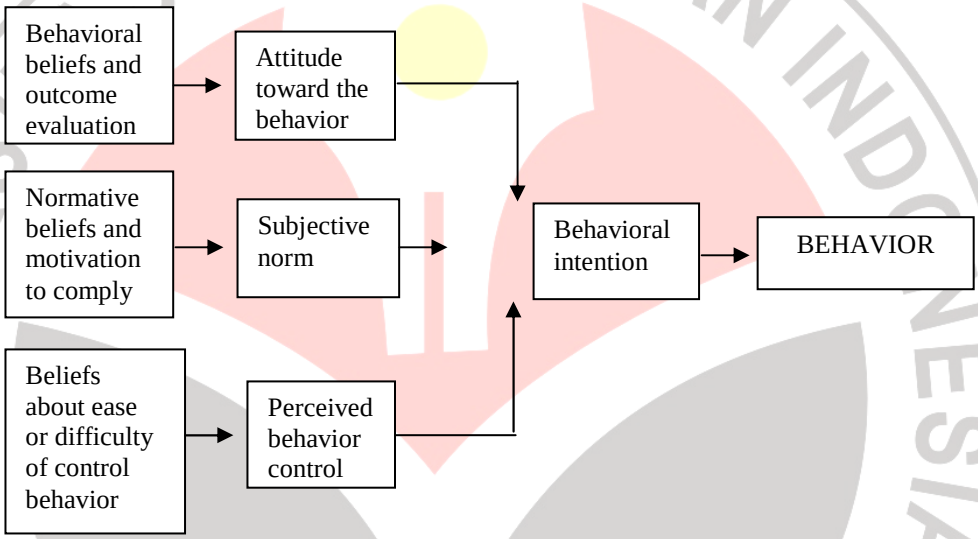

Gamber 2.4 Teory Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Inti Teori Perilaku Terencana tetap berada pada faktor intensi perilaku namun determinan intensi tidak hanya ada dua: sikap (*attitude*) dan norma (*norm*), tapi juga ada aspek kontrol perilaku (*behavior control*).

Keyakinan bahwa perilaku akan membawa hasil (*behavioral beliefs and outcome evaluation*) akan mempengaruhi timbulnya sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), dan keyakinan normatif dan motivasi untuk bertindak (*normative beliefs and motivation to comply*) membentuk norma subyektif (*subjective norm*), serta keyakinan akan sulit atau mudahnya mengontrol perilaku (*beliefs about ease or difficulty of control behavior*) akan

mempengaruhi lahirnya kontrol perilaku yang dihayati (*perceived behavioral control*), yang kesemuanya menentukan adanya niat atau keinginan untuk berperilaku (*behavioral intention*), yang pada akhirnya mengasilkan perilaku tertentu (*behavior*).

Dr. James Ang (2006) menyebutkan beberapa kriteria perilaku supervisi yang sukses seperti berikut:

1). Memiliki pola pikir yang terbuka tentang guru dan siswa ketika dia berangkat ke sekolah.
2). Mencoba mengumpulkan informasi sebelum membuat kesimpulan.
3). Mengumpulkan informasi yang lebih bisa membantu bukan sekedar mengkritik.
4). Tetap membincangkan dan berusaha memperhatikan tindakan kelas senormal mungkin.
5). Menjadi pemimpin bukan pengendara.
6). Lebih memberikan contoh konkrit dibanding persepsi abstrak.
7). Percaya pada guru, memperlihatkan apresiasi terhadap kerja mereka, dan memberikan semangat untuk punya prakarsa.
8). Dengan sadar dan seksama memelihara komunikasi dua arah yang terbuka.
9). Santun terhadap guru dan siswa, juga menyadari masalah mereka dan mencoba menyelesaikannya.
10). Memperlihatkan kestabilan emosi, suasana hati dan temperamen yang terkontrol.

11). Mengerjakan tugas rumah. Datang ke sekolah dengan persiapan penuh, dengan ceklis menawarkan arahan yang profesional.

Ada beberapa hasil penelitian yang mengarah pada perilaku supervisi. Campbell (dalam Neagley, 1980: 52) mengkaji hubungan antara kepemimpinan supervisi dan beragam faktor situasi di lingkungan sosial dimana supervisi terjadi. Temuannya menyingkapkan bahwa guru menghargai (*value*) perilaku supervisor yang menyontohkan kehangatan (*warmth*), saling percaya (*mutual trust*), pertemanan (*friendship*) dan penghargaan (*respect).* Dan Grossman (dalam Negley, 1980: 52), dari studi tentang evaluasi guru, terhadap praktek supervisi menemukan hal-hal yang bermanfaat bagi guru adalah: sikap membantu (*helpful attitude*), pertemuan non formal (*non formal conference*), demonstasi mengajar (*demonstration teaching*), asistensi yang disiplin *(assistance with dicipline*), observasi informal (*informal observation*), asistensi yang terencana (*assistance with planning*), penyediaan buku dan bahan-bahan (*provision of books and materials*), asistensi bagi guru baru (*assistance to new teachers*), dan penyediaan bantuan administratif (*provision of administrative assistance*)

Sedangkan tentang pengaruh perilaku supervisi, Laurel Montgomery dan Carol Seefeldt dari *University of Maryland* menyatakan bahwa dari penelitian dalam pendidikan, perilaku pengawas (*supervisor*) dipercaya sangat penting bagi perbaikan pendidikan, praktek pengajaran inovatif dan kepuasan kerja guru (Deal & Celloti, 1980; Dreeben, 1973; Fullan & Pomfret, 1977 dalam Montgomery:). Dikatakan juga bahwa perilaku supervisi

mempengaruhi perilaku guru. "*Supervisory behavior, in the school setting, is believed to directly and purposefully influence teacher behavior in a way that facilitates student learning*."

5. Personal/pelaku Supervisi

Personal supervisi adalah semua orang yang mempunyai tanggung jawab membantu dan mendukung guru memperbaiki mutu pembelajaran sehingga menghasilkan mutu pendidikan yang lebih baik. Dalam kurikulum SMU tahun 1994 dijelaskan bahwa 'yang tergolong Pembina atau supervisor adalah kepala sekolah, pengawas, guru senior dan pembina lainnya' (dalam Kustimi, 2002:46). Sedangkan menurut Glickman (dalam Kustimi: 46-47), yang bertanggung jawab untuk memperbaiki guru mengajar adalah supervisor yang terdiri dari: '*principal, subject area specialist, assistant principal, departement chairperson, head teacher atau central office consultant*.' Sergiovanni (dalam Arikunto: 13) menyatakan bahwa dalam supervisi modern supervisi bukan hanya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk tapi oleh seluruh personel yang ada di sekolah (*by the entire school staffs*).

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan pada pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwa penugasan pengawasan pendidikan formal diserahkan pada pengawas satuan pendidikan dengan kriteria minimal: berstatus sebagai guru (minimal delapan tahun) atau kepala sekolah (minimal 4 tahun) pada level pendidikan yang sama dengan yang diawasi. Selain itu kriteria lain adalah mempunyai sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan dan lulus seleksi pengawas

satuan pendidikan, sementara kriteria lebih rinci dijelaskan dalam Permendiknas No. 12 tahun2007.

Jadi personel yang bertanggung jawab dan terlibat dalam supervisi pendidikan, dalam Standar Nasional Pendidikan disebutkan dalam Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang berupa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, adalah seperti terlihat pada tabel 2.2 berikut:

i. No 12 tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah

Dimensi Kompetensi	**Kompetensi**
1. Kompetensi Kepribadian	1.1 Memiliki tanggung jawab sebagai pengawas satuan pendidikan.
	1.2 Kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas jabatannya.
	1.3 Memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggung jawabnya.
	1.4 Menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada stakeholder pendidikan.
2. Kompetensi Supervisi Manajerial	2.1Menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah menengah yang sejenis.
	2.2 Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi-misi-tujuan dan program pendidikan sekolah menengah yang sejenis.
	2.3Menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di sekolah menengah yang sejenis.
	2.4Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah menengah yang sejenis.
	2.5Membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah menengah yang sejenis.
	2.6Membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah menengah yang sejenis.

	2.7Mendorong guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah menengah yang sejenis.
	2.8Memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepala sekolah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah menengah yang sejenis.
3. **Kompetensi Supervisi Akademik**	3.1 Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.
	3.2 Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran /bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.
	3.3 Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP.
	3.4 Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui mata-mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.
	3.5 Membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.
	3.6 Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan atau di lapangan) untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.
	3.7 Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.
	3.8 Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran/ bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaan yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.
4. Kompetensi Evaluasi Pendidikan	4.1 Menyusun criteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.

	4.2 Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.
	4.3 Menilai kinerja kepala sekolah, kinerja guru dan staf sekolah lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan pada tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.
	4.4 Memantau pelaksanaan pembelajaran/ bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.
	4.5 Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk kepentingan pendidikan dan pembelajaran/ bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.
	4.6 Mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala sekolah, kinerja guru dan staf sekolah di sekolah menengah yang sejenis.
5. Kompetensi Penelitian Pengembangan	5.1 Menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam pendidikan.
	5.2 Menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik untuk keperluan tugas pengawasan maupun untuk pengembangan karirnya sebagai pengawas.
	5.3 Menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif.
	5.4 Melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah pendidikan, dan perumusan kebijakan pendidikan yang bermanfaat bagi tugas pokok tanggung jawabnya.
	5.5 Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data kualitatif maupun data kuantitatif.
	5.6 Menulis karya tulis ilmiah (KTI) dalam bidang pendidikan dan atau bidang kepengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan
	5.7 Menyusun pedoman/panduan dan atau buku/modul yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan di sekolah menengah yang sejenis.
	5.8 Memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas, baik perencanaan maupun pelaksanaannya di sekolah menengah yang sejenis.
6. Kompetensi Sosial	6.1 Bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
	6.2 Aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas satuan pendidikan.

Penentuan standar kompetensi pengawas sekolah berguna sebagai acuan untuk mengukur kemampuan dan kinerja pengawas sekolah dalam pelaksanaan tugas kepengawasannya di satuan pendidikan, sehingga selanjutnya pembinaan dan peningkatan mutu dan pengawas sekolah juga bisa disiapkan dalam usaha meningkatkan kinerja pengawas sekolah.

Tabel 2.3
ii. No 13 tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah

4	**Supervisi**	3.1 Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.
		3.2 Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.
		3.3 Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

Dari dua Permendiknas di atas, yang disebutkan kompetensi supervisinya adalah Pengawas dan Kepala Sekolah, sedang peranan guru senior sebagai ’supervisor’ adalah kebijakan yang biasa dilakukan lewat MGMP sekolah sebagai usaha saling bantu guru memperbaiki dan meningkatkan kompetensinya. Menurut Pidarta (2009: 25) para supervisor ini yang diambil dari *guru-guru yang sudah senior* secara profesional dalam arti kemampuan menguasai materi pelajaran dan melaksanakan proses pembelajaran, baru dapat dikategorikan sebagai semi supervisor. Kebijakan ini diambil karena kebutuhan guru bidang studi yang sulit menguasai pelajaran. Dan ini bisa dijadikan bahan penilaian prestasi akademik dalam mekanisme penilaian Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB) yakni

pembimbingan kepada teman sejawat seperti dijelaskan dalam Rambu-rambu PPKHB.

Menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.118 tahun 1996, tanggung jawab Pengawas Sekolah adalah:

1) melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah,
2) meningkatkan kualitas pembelajaran, hasil belajar, dan bimbingan peserta didik dalam pencapaian tujuan pendidikan.

Sedangkan wewenang Pengawas Sekolah adalah:

1. Memilih dan menentukan metode kerja yang profesional untuk hasil yang optimal, menetapkan kinerja guru dan tenaga lain yang diawasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi.
2. Menentukan dan atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.

Sedangkan Kepala Sekolah mempunyai beberapa peran atau fungsi yakni primaentrevisi: **pri**badi, **ma**najer, **enter**preneur, super**vi**sor, dan sosial (Usman, 2008: 15). Salah satu fungsi tersebut adalah supervisor. Supervisor adalah seorang yang profesional. Dalam menjalankan tugasnya, ia bertindak atas dasar kaidah-kaidah ilmiah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Untuk melakukan *supervisi* diperlukan kelebihan yang dapat melihat dengan tajam terhadap permasalahan peningkatan mutu pendidikan, menggunakan kepekaan untuk memahaminya dan tidak hanya sekedar menggunakan penglihatan mata biasa. Ia membina peningkatan mutu akademik melalui penciptaan situasi belajar yang lebih baik, baik dalam hal fisik maupun lingkungan non fisik.

Indonesia mempunyai bagan organisasi supervisi seperti berikut:

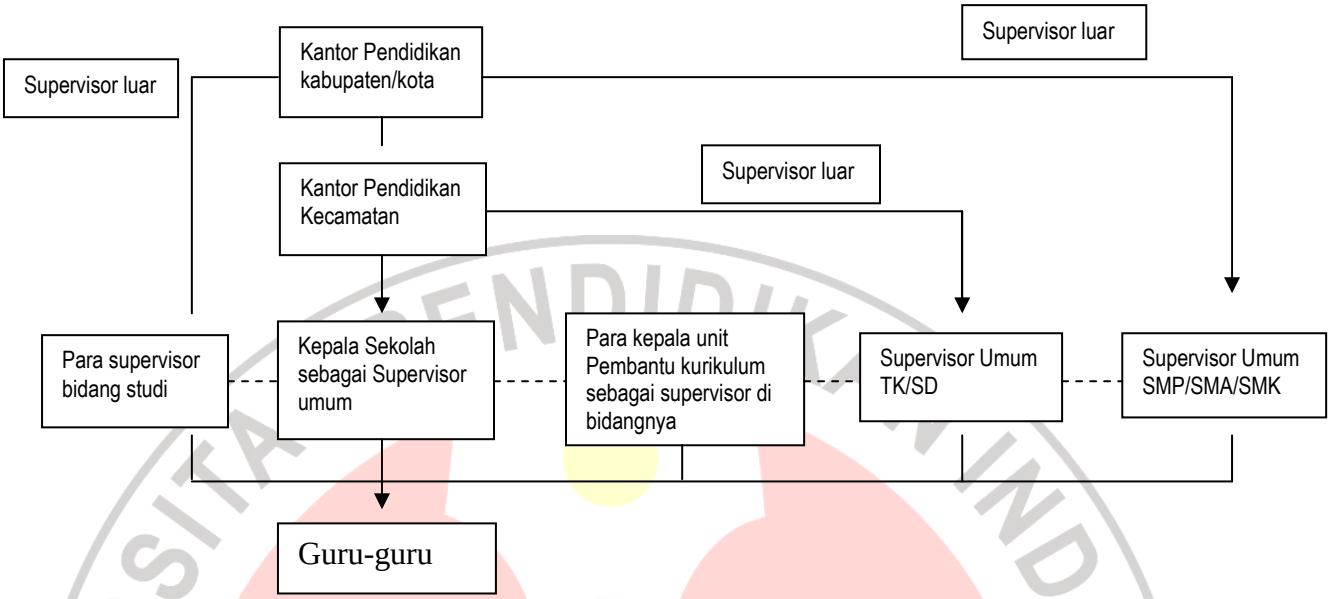

Gbr 2.5. Organisasi Supervisi di Indonesia (modifikasi dari Pidarta, 2009: 62)

6. Model Supervisi

Sahertian (2000: 34-44) menjelaskan bahwa ada empat model atau pola supervisi yang berkembang yakni: model Konvensional, Ilmiah, Klinis dan Artistik.

Model Konvensional merupakan model dimana kekuasaan bersifat otoriter, didominasi oleh pemimpin yang senang mencari kesalahan. Perilaku supervisinya inspektif dan korektif, dan tidak melihat segi positif pekerjaan orang lain. Sahertian mengatakan praktek mencari kesalahan dan menekan bawahan ini masih terlihat pada saat ini (2007:35).

Model supervisi yang lain adalah Supervisi Ilmiah, yang mempunyai ciri-ciri: terencana dan kontiniu, sistematis dan menggunakan prosedur dan teknik tertentu, serta dengan data yang objektif dari keadaan riil. Pidarta (2009: 72) menambahkan ciri-ciri supervisi ilmiah dengan: 1) membuat

peraturan tentang pembelajaran, 2) membuat peraturan tentang teknik supervisi, 3) supervisor dan guru mematuhi peraturan itu, 4) membuat standar lulusan, dan 5) lulusan diharapkan tepat dengan standar itu. Model ini agak tergantung pada angka-angka dan ketentuan dan kurang mempertimbangkan unsur-unsur manusiawi.

Model yang lebih disarankan adalah Supervisi Klinis yang dipahami sebagai proses pembimbingan dalam pendidikan dengan tujuan membantu pengembangan profesional guru dalam mengajar melalui observasi dan analisis data secara obyektif, teliti sehingga dijadikan dasar atau acuan bagi perbaikan perilaku mengajar guru (Sahertian, 2000: 37).

Prinsip- prinsip supervisi klinis adalah: a) Supervisi klinis dilaksanakan harus berdasarkan inisiatif dari para guru, b) Ciptakan suasana manusiawi yang bersifat interaktif dan kesejawatan, c) Ciptakan suasana bebas sehingga guru bisa mengemukakan apa kesulitannya sehingga supervisor bisa mencarikan solusinya, d) Objek kajian adalah kebutuhan profesional guru yang sungguh mereka alami, dan e) perhatian dipusatkan pada unsur-unsur spesifik yang diangkat untuk diperbaiki (Sahertian, 2000:39).

Model terakhir adalah Supervisi Artistik yakni yang lebih banyak menggunakan bahasa penerimaan dibanding penolakan (Thomas Gordon dalam Sahertian,2000:43). Supervisi juga dipandang sebagai kegiatan atau bekerja untuk orang lain (*working for the others*), bekerja dengan orang lain (*working with the others*), dan bekerja melalui orang lain (*working through the others*), sehingga membutuhkan hubungan kemanusiaan yang lebih baik

seperti saling percaya, saling mengerti, saling menghormati, saling mengakui, dan saling menerima.

7. Pendekatan Supervisi

Supervisi dapat dilaksanakan melalui tiga pendekatan yakni langsung (*directive*), tidak langsung (*non directive*) dan kolaboratif (*collaborative*). Pendekatan Langsung terjadi bila: supervisor memberikan arahan langsung, pengaruh perilaku supervisi lebih dominan, dan berdasarkan pemahaman psikologi behavior dimana segala perbuatan berasal dari reflex yaitu respon terhadap stimulus, serta supervisor dapat menggunakan penguatan (*reinforcement*) dan hukuman (*punishment*). Pendekatan ini dilakukan dengan perilaku supervisor: menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, member contoh, menetapkan tolok ukur, dan menguatkan.

Sedangkan pendekatan Tidak Langsung lebih mendahulukan mendengarkan dengan aktif apa yang dikemukakan guru, tidak langsung pada permasalahan. Pendekatan ini berdasarkan psikologi humanistik dimana sangat menghargai orang yang akan dibantu. Perilaku supervisor dalam pendekatan ini adalah: mendengarkan, memberi penguatan, menjelaskan, dan memecahkan masalah.

Pendekatan Kolaboratif adalah pendekatan yang memadukan pendekatan Langsung dan Tidak Langsung. Pada pendekatan ini, supervisor dan guru bersama-sama sepakat dalam menetapkan struktur, proses dan criteria pembahasan masalah. Pendekatan ini didasarkan pada psikologi kognitif yang beranggapan bahwa belajar adalah hasil paduan antara kegiatan

individu dengan lingkungannya yang akhirnya berpengaruh pada pembentukan aktivitas individu. Pendekatan yang menggunakan dua arah ini, atas ke bawah dan sebaliknya, memperlihatkan perilaku supervisor yang: menyajikan, menjelaskan, mendengarkan, memecahkan masalah, dan negosiasi (Sahertian, 2000:44-52).

8. Supervisi di Masa Sekarang dan Masa Depan

Pidarta (2009: 76-82) menyorot supervisi mulai abad ke 20 sebagai supervisi masa sekarang yang menggunakan pendekatan humanisme disamping akuntabilitas (ilmiah), menekankan pada hubungan yang harmonis ,demokratis dan dinamis, menekankan metode intelegensi praktis, menggunakan variabel perantara, serta bersifat komprehensif dan kontekstual.

Pendekatan humanisme sangat memperhatikan dan memahami keadaan guru yang disupervisi baik kepribadian, hobi, watak dan watak masing-masing guru. Supervisi sekarang juga menekankan pada hubungan yang akrab dan terbuka, walau tetap dalam batas tertentu unsur ilmiah tetap digunakan seperti akuntabilitas. Akuntabilitas adalah istilah untuk menentukan keberhasilan dan ketidakberhasilan kegiatan tertentu dalam pendidikan, apakah cocok dengan kriteria atau target yang sudah ditentukan.

Hubungan yang demokratis akan memberi kesempatan guru agar berinisiatif, aktif dan kreatif. Demokratis berarti menghargai setiap kegiatan yang positif, tidak menghalangi apalagi mengekang. Sedangkan sifat dinamis dibutuhkan agar supervisi mengarah pada perencanaan proses belajar yang memberi hasil yang lebih baik.

Pidarta (2009: 82-86) juga menggambarkan kemungkinan bagaimana supervisi dimasa mendatang, ditinjau dari tiga sudut yakni sudut professional guru, sudut politik negara, dan segi perbedaan kondisi negara umumnya dan daerah khususnya.

Dari sudut professional, supervisi akan terpusat pada pengembangan profesi pendidik, dengan pertimbangan perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat yang menuntut manusia juga berubah dengan cepat. Anak-anak harus disiapkan mampu menghadapi dan menuntaskan permasalahan di masa mereka sehingga guru diharapkan lebih duluan dan banyak memahami sehingga bisa memberikan bekal yang cukup untuk mereka.

Kecenderungan lain supervisi di masa datang adalah didominasi politik dimana pendidik di bawah kontrol negara. Hal ini terjadi karena pemerintah memandang perlu mengawasi sekolah agar anggota masyarakat yang diproduksi mampu mempertahankan kedaulatan negara dan tidak dipengaruhi negara lain. Namun Pidarta (2009:84) menyarankan agar supervisor mengambil jalan tengah, yaitu tetap mengembangkan profesi guru dengan tidak mengabaikan politik Negara.

Pilihan kecenderungan yang lain adalah supervisi kontekstual dimana supervisi harus disesuaikan dengan perbedaan kondisi daerah, keragaman geografi, budaya dan kemampuan guru sehingga supervisor harus menggunakan pendekatan dan teknik yang tepat dan mungkin berbeda.

Namun Sahertian (2000: 27) melihat supervisi dimasa mendatang dari sudut objek supervisi yang harus dikembangkan. Dia mengusulkan agar

supervisi mencakup: pembinaan kurikulum, perbaikan proses pembelajaran, pengembangan staff, dan pemeliharaan dan perawatan moral serta semangat kerja guru-guru. Jadi supervis dimasa mendatang harus lebih menguatkan perilaku supervisinya.

9. Supervisi dan Penjaminan Mutu

Untuk melihat dengan jelas alur supervisi dan kontribusinya, dan hubungannya dengan penjaminan mutu, penulis mengambarkan dengan denah berikut:

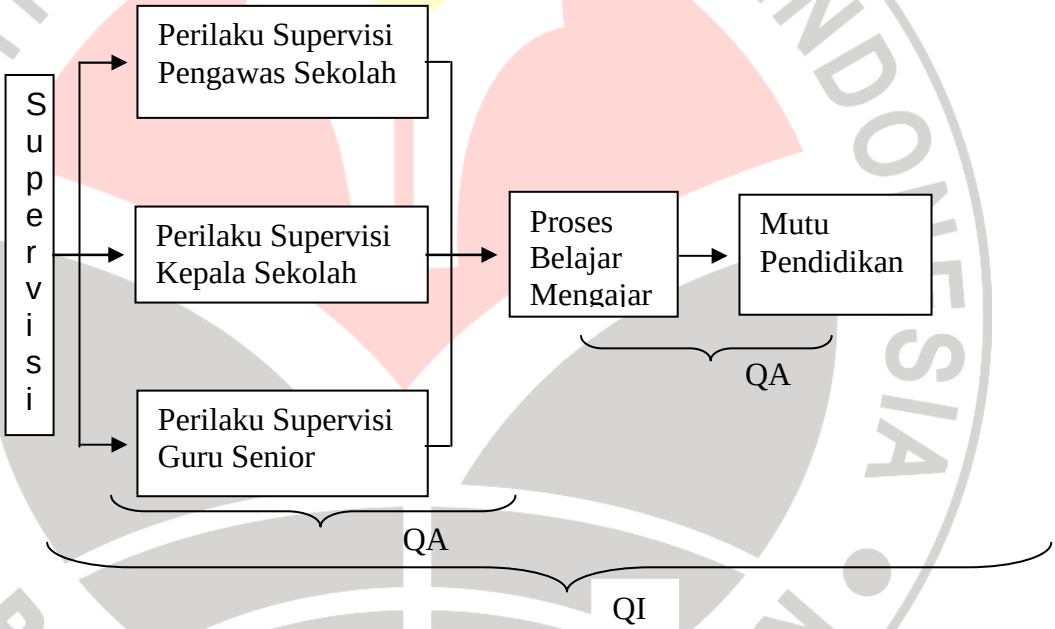

Gambar 2.6 Alur Supervisi

Pengukuran perilaku supervisi dari pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru senior merupakan kualiti kontrol (QC) untuk memastikan bahwa kompetensi supervisi yang tercantum dalam Permendiknas No. 12 tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah dan Permendiknas No. 13 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah sudah dipenuhi dan dilaksanakan (QA). Begitu juga dengan pengukuran dan penjaminan bahwa proses pembelajaran sudah dilaksanakan sesuai dengan Standar Proses

(Permendiknas No. 41 tahun 2007) dan kompetensi guru yang dijelaskan dalam Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru (Permendiknas No. 16 tahun 2007). Selanjutnya juga diukur dan dipastikan bahwa mutu sekolah membaik dengan meningkatnya efektivitas sekolah yang menjadi salah satu unsur mutu. Efektivitas sekolah diukur dengan memastikan bahwa Standar Kompetensi Lulusan (Permendiknas No. 23 tahun 2006) sudah dicapai. Jadi dengan dilaksanakannya supervisi seyogyanya berkorelasi positif dengan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan atau adanya perbaikan mutu pendidikan (*QI, quality improvement*).

Rahmat (2009) menghubungkan supervisi dengan strategi manajemen sekolah. Dia menyatakan bahwa supervisi merupakan salah satu strategi untuk memastikan bahwa seluruh langkah pada proses penyelenggaraan dan semua komponen hasil yang dicapai memenuhi target. Supervisi adalah strategi manajemen yang terdiri atas serangkaian kegiatan untuk memastikan bahwa mutu yang diharapkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi memenuhi standar yang telah ditentukan.

Praktek supervisi berbeda tergantung pada kesadaran dan tanggung jawab pimpinan sekolah atau pemangku kepentingan untuk meningkatkan penjaminan mutu. Kesadaran akan pentingnya meningkatkan mutu juga terkait dengan peran, fungsi, dan pembagian tugas dalam organisasi. Pelaksanaannya selalu terkait pada konsistensi lembaga, kegiatan akademik, profesionalisme, dan kesungguhan penyelenggara pendidikan akan pentingnya memastikan

bahwa mutu yang diharapkan dapat terus terjaga sejak langkah perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauannya.

Supervisi pendidikan bertujuan menghimpun informasi atau kondisi nyata pelaksanaan tugas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan tugas pokoknya, sebagai dasar untuk melakukan pembinaan dan tindak lanjut perbaikan kinerja belajar siswa.

Target utama kegiatan supervisi adalah berkembangnya proses perbaikan mutu secara berkelanjutan (*continuous improvement*), meningkatnya tanggung jawab sejak awal, membiasakan tiap tahap pekerjaan jelas mutunya, dan meningkatnya kejelasan pengaruh pelaksanaan tugas profesi terhadap hasil belajar siswa. Tujuan perantara supervisi seperti halnya program penjaminan mutu adalah menumbuhkan budaya mutu karena mutu itu adalah budaya yang selalu menjunjung tinggi target pada tiap langkah kegiatan.

Dapat disimpulkan bahwa supervisi merupakan satu proses terintergrasi yang memastikan/menjamin (*assure*) bahwa semua standar dilaksanakan dan target tercapai.

A. Defenisi Operasional

Dari beragam teori dan sumber di atas, penulis memaknai:

1. Perilaku supervisi akademis adalah semua perilaku yang mengarah pada usaha membantu guru memperbaiki mutu pembelajaran baik proses (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) maupun hasilnya. Perilaku supervisi mengarah pada kompetensi kepribadian, supervisi akademis, dan

kompetensi evaluasi seperti yang terdapat dalam Standar Kompetensi Pengawas dan kepala Sekolah.

2. Personel supervisi adalah orang yang mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu guru memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran, yang di Indonesia adalah: pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru senior. Ini juga berhubungan dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
3. Mutu pembelajaran adalah ketercapaian tujuan dan target pembelajaran yang sekarang bisa mengacu pada Standar Proses. Untuk mengukurnya digunakan kinerja guru yang sesuai juga dengan Standar Kompetensi Guru.
4. Mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional seperti dijelaskan dalam Permendiknas No. 63 tahun 2009. Untuk penelitian ini diukur dengan efektivitas sekolah. Efektivitas sekolah adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran/tujuan (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Efektivitas sekolah diukur berdasarkan pada Standar Kompetensi Lulusan.
5. Pengendalian mutu (***quality control***) adalah memastikan bahwa outcome, layanan, atau proses yang diberikan memenuhi persyaratan atau standar tertentu dengan cara mengevaluasi atau mengukurnya.
6. Penjaminan mutu (***quality assurance***) pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat

untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan (Permendiknas N0.63 tahun 2009). Dalam penelitian ini, supervisi adalah salah satu kegiatan untuk meyakinkan tercapainya mutu pendidikan.

7. Perbaikan mutu (***quality improvement***) adalah pendekatan yang mengukur proses dan outcome/hasil belajar siswa untuk dijadikan rekomendasi perbaikan ke depan.

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PERPUSTAKAAN

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode

Metode penelitian merupakan cara-cara dan pendekatan yang digunakan dalam keseluruhan tahap penelitian. Menurut Sugiyono (2007:1) penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif analitis dimana yang menjadi data penelitian ini adalah angka-angka yang akan dideskripsikan dan dianalisa hubungan atau korelasinya dan kekuatan hubungan tersebut. Pertama, perilaku supervisi akademis diukur dengan mengambil data dari kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru senior. Data yang didapat dari masing-masing responden lalu dianalisa secara *kuantitatif* yakni dengan analisa deskriptif untuk menjawab rumusan masalah deskriptif; gambaran perilaku supervisi akademis, mutu proses pembelajaran (kinerja guru), dan mutu sekolah (efektivitas sekolah). Kemudian *dianalisis* korelasi antar variabelnya (r_1, r_2, r_3 dan R).

Skema penelitiannya, terdiri dari lebih dari dua variabel tapi hubungannya masih sederhana, adalah sebagai berikut.

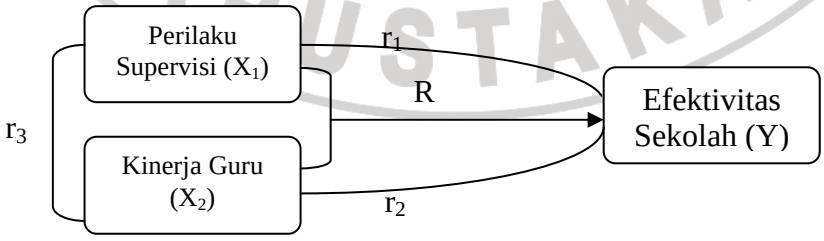

Gambar 3.1

Skema Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian atau membuktikan hipotesis maka setelah didapat gambaran atau deskripsi masing-masing variabel, maka selanjutnya dengan bantuan rumus statistik dicari berapa $r_{1,}$ $r_{2,}$ $r_{3,}$ dan Rnya untuk menganalis seberapa kuat pengaruhnya antar variabel dengan skema dua variabel penentu (independen) dengan satu variabel dependen.

Prosedur untuk penelitian ini adalah seperti tergambar dalam diagram berikut:

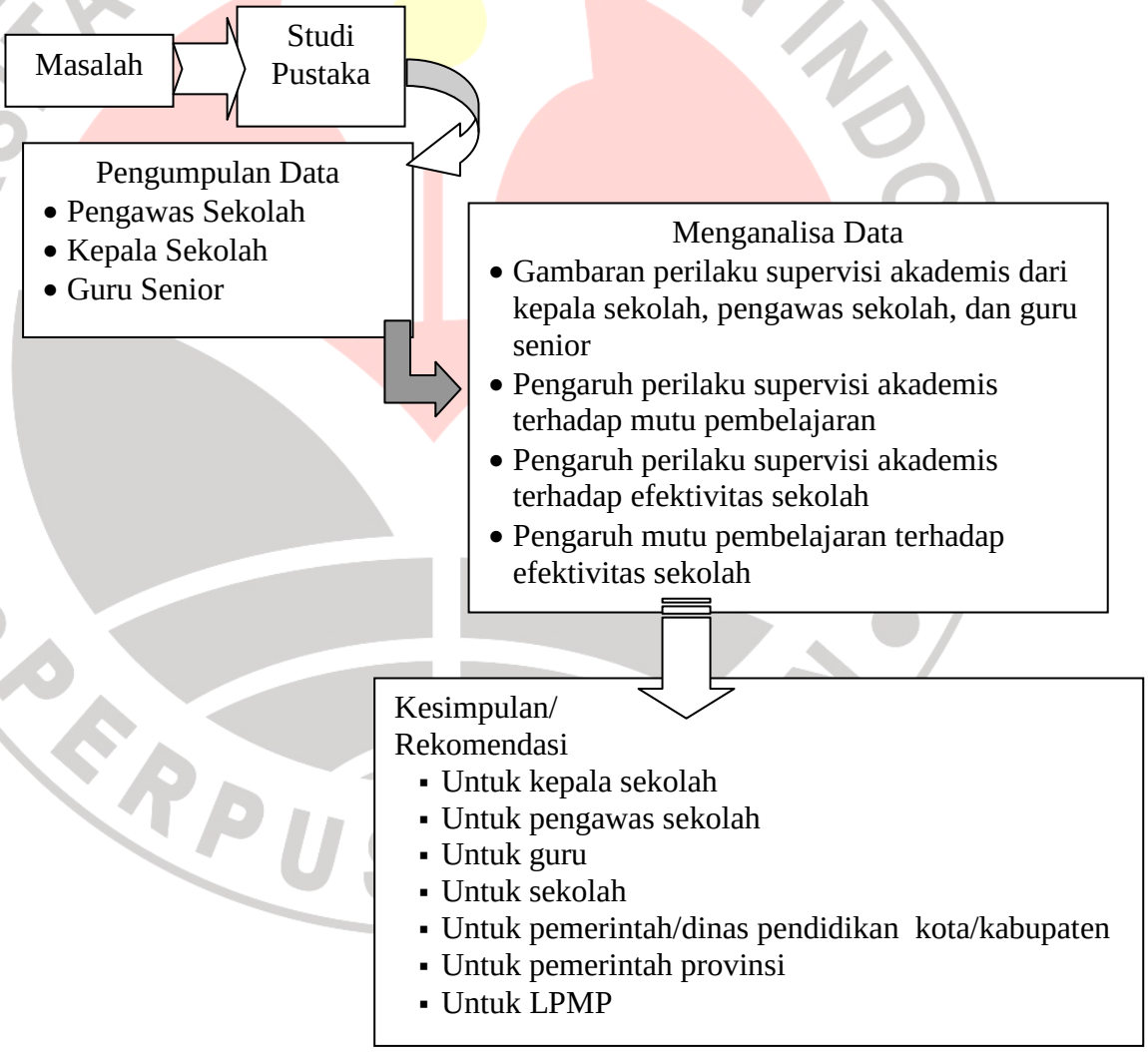

Gambar 3.2

Prosedur Penelitian

B. Populasi dan Sampel

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Jambi dengan membatasi hanya Sekolah Menengah Atas Negeri se Kota Jambi yang berjumlah sebelas (11) sekolah. Yang akan dijadikan responden adalah semua Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan guru senior atau guru inti.

Pemilihan ini berdasarkan kebutuhan masalah dasar penelitian yakni perilaku supervisi sehingga dibutuhkan pelaku-pelaku supervisi pendidikan sebagai sumber informasi. Dasar pemilihan lain adalah untuk kebutuhan pemetaan mutu (*mapping quality*) sekolah. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bagian dari *school review* atau evaluasi diri sekolah sehingga pada penelitian ini sekolah dijadikan unit penelitian.

Responden berjumlah 66 orang dengan perincian 11 kepala sekolah, 11 pengawas sekolah (peraturan baru membedakan antara pengawas SMA dan SMP sehingga jumlah pengawas SMA hanya berjumlah 12 orang) dan 44 guru senior atau guru inti. Jadi responden untuk tiap sekolah adalah satu pengawas sekolah pembina, satu kepala sekolah dan empat guru senior mewakili empat rumput mata pelajaran. Pada penelitian ini responden merupakan sampel dengan teknik pemilihan *disproportionate stratified random sampling* karena populasi berstrata dan kurang proporsional dan dengan teknik pertimbangan tertentu (*purposeful sampling*) yakni orang-orang yang langsung bertanggung jawab melaksanakan supervisi dan atau yang punya kapasitas atau terlibat di bidang supervisi. Karena jumlahnya sedikit maka sampel pengawas sekolah dan kepala sekolah merupakan juga populasi (Sugiyono, 2007: 121). Danim

(2007: 28) mengatakan untuk populasi penelitian yang relatif kecil, penentuan sampel sering tak mengalami kesulitan, sampel bisa diambil sebesar populasi.

C. Instrumen

Instrumen yang akan dipakai ada tiga macam yakni untuk mengukur perilaku supervisi akademis, mutu pembelajaran melalui instrument kinerja guru, dan efektivitas sekolah melalui instrument standar kompetensi lulusan. Instrumen Perilaku Supervisi Akademis disusun berdasarkan sandingan teori dan Standar Kompetensi Pengawas Sekolah dan Standar Kompetensi Kepala Sekolah. Instrumen Kinerja guru merupakan modifikasi dari instrumen yang penulis dapatkan dari web *gurupembaharu,* yang sesuai dengan Standar Pendidik dan Standar Proses. McMillan dan Schumacher (2001: 258) mengatakan bahwa instrumen yang sudah ada dengan reliabilitas dan validitas yang mapan (*established*) bisa digunakan atau diadaptasi. Sedangkan untuk efektivitas sekolah diukur dengan instrument yang berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan- Satuan Pendidikan.

Instrumen yang paling umum untuk menilai pendidikan untuk memperbaiki atau menguatkan mutu adalah kuesioner yang diperluas (*extended questionnaire*) yang akan diisi oleh responden.

Instrumen Perilaku Supervisi Akademis untuk pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru senior terdiri dari enam (6) dimensi dan dikembangkan menjadi 18 item pertanyaan. Sedangkan instrumen Kinerja Guru terdiri dari lima (5) dimensi yang dikembangkan menjadi 36 item

pertanyaan. Untuk efektivitas sekolah, instrumennya terdiri dari 6 dimensi dan 38 item. Instrumen disusun dengan bantuan kisi-kisi.

Tabe 3.1

Kisi-kisi Penelitian

VARIABEL	DEFENISI VARIABEL	SUB VARIABEL		INDIKATOR	
PERILAKU SUPERVISI AKADEMIS	Perilaku yang mengarah pada usaha membantu guru memperbaiki mutu proses pembelajaran	1	Tanggung Jawab	1)	Memiliki tanggung jawab sebagai pelaku supervisi satuan pendidikan.
				2)	Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran/bimbingan
				3)	Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap mata pelajaran
				4)	Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbingan
				5)	Membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk tiap mata pelajaran
				6)	Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan atau di lapangan) untuk tiap mata pelajaran
		2	Motivasi	1)	Menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada stakeholder pendidikan.
				2)	Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran/ bimbingan
		3	Kompetensi	1)	Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap mata pelajaran
				2)	Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran /bimbingan tiap mata pelajaran

		4	Kreativitas	1)	Memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggung jawabnya
				2)	Kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas jabatannya
		5	Komitmen	1)	Menetapkan tujuan, target dan jadwal supervisi
				2)	Memantau pelaksanaan pembelajaran/ bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran
				3)	Mengolah dan menganalisis data hasil penilaian program supervisi
		6	Kesabaran	1	Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk kepentingan pendidikan dan pembelajaran/ bimbingan tiap mata pelajaran
				2)	Bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
				3)	Aktif dalam kegiatan asosiasi/organisasi profesi.
PROSES PEMBELAJARAN /Kinerja Guru	Ketercapaian tujuan dan target pembelajaran yang mengacu pada Standar Proses dan Standar Kompetensi Guru	1	Perencanaan Pembelajaran	1)	Merumuskan Silabus dan RPP
				2)	Merumuskan materi
				3)	Merumuskan metode
				4)	Menentukan peraga
				5)	Menentukan sumber belajar
				6)	Merumuskan evaluasi
		2	Pelaksanaan Pembelajaran	1)	Kehadiran melaksanakan tugas PBM
				2)	Menggunakan RPP
				3)	Menggunakan sumber belajar yang variatif
				4)	Melakukan kegiatan pendahuluan
				5)	Menyampaikan konsep materi sesuai RPP

				6)	Menggunakan konsep dengan bahasa yang jelas dan sistematis
				7)	Menggunakan alat peraga
				8)	Mendayagunakan TIK
				9)	Membangun pengalaman belajar peserta didik
				10)	Membangun suasana kelas yang menyenangkan
				11)	Memenuhi target ketuntasan
				12)	Memiliki catatan kehadiran peserta didik
		3	Evaluasi Pembelajaran	1)	Melakukan penilaian proses
				2)	Melaksanakan tes akhir kegiatan pembelajaran
				3)	Memiliki data penilaian hasil belajar peserta didik
				4)	Mendisain remedial dan pengayaan
				5)	Menganalis soal
				6)	Menyusun laporan kinerja belajar peserta didik
MUTU SEKOLAH/ Efektivitas Sekolah	Ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran/tujuan telah tercapai (SKL-SP)	1	Peningkatan kecerdasan dan pengetahuan	1)	Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, kritis, kreatif, dan inovatif
				2)	Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan
				3)	Menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam dan sosial
				4)	Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab
				5)	Menunjukkan keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis
				6)	Menunjukkan keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Indonesia dan Inggris
		2	Peningkatan kepribadian dan akhlak mulia	1)	Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan perkembangan remaja
				2)	Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan diri serta memperbaiki kekurangan

				3)	Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan social
				4)	Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan social,ekonomi dalam lingkup global
				5)	Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
				6)	Berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun
				7)	Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat
				8)	Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain
		3	Peningkatan keterampilan hidup	1)	Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk pemberdayaan diri
				2)	Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang terbaik
				3)	Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah kompleks
				4)	Menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun kelompok
				5)	Menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani, serta kebersihan lingkungan
		4	Peningkatan kesempatan melanjutkan pendidikan	1)	Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan tinggi

Instrumen Perilaku Supervisi Akademis bertujuan untuk mengumpulkan data tentang bagaimana perilaku supervisi akademis dari pelaku supervisi di sekolah masing-masing yakni pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru senior. Ini merupakan semacam evaluasi diri (*self assessment*) dari responden terhadap tanggung jawab, motivasi, kompetensi,

kreativitas, komitmen dan kesabaran mereka dalam melaksanakan tugas supervisi di sekolah. Instrumen ini disusun dengan menyandingkan teori *human resources supervision* Argyris, *normative supervision* Sergiovanni dan Starrat, Permendiknas N0.12 dan 13 tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas dan Kepala Sekolah.

Sedangkan insrumen ke dua yakni tentang Kinerja Guru bertujuan mengukur mutu pembelajaran melalui kinerja guru yang dilihat dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru-guru senior melihat bagaimana kinerja guru-guru di sekolah yang bersangkutan. Instrumen ini berkaitan dengan Standar Proses (Permendiknas No. 41 tahun 2007), dan Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru (Permendiknas No. 16 tahun 2007).

Instrumen yang ke tiga adalah instrument yang mengukur efektivitas sekolah melalui ketercapaian standar kompetensi lulusan- satuan pendidikan. Instrumen ini mengukur bagaimana keberhasilan siswa (*student achievement*) baik dari segi peningkatan kecerdasan dan pengetahuan, peningkatan kepribadian dan akhlak, peningkatan keterampilan hidup dan peningkatan kesempatan melanjutkan pendidikan. Instrumen ini disusun berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan-Satuan Pendidikan (Permendiknas No. 23 tahun 2006).

1. Uji Coba Instrumen

Instrumen yang akan digunakan untuk pengumpulan data harus valid dan reliabel dengan harapan hasil penelitian juga valid dan reliabel. Valid maksudnya instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, dan reliabel berarti bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Untuk menguji apakah instrumen yang sudah disusun valid dan reliabel maka dilakukan melalui ujicoba instrumen.

Ujicoba instrumen ini dilaksanakan di Kabupaten Muara Jambi terhadap pengawas, kepala sekolah dan guru senior. Karena populasi dengan karakteristik sama jumlahnya terbatas maka terkumpul data dari dua puluh satu (21) responden.

a. Validitas Instrumen

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Analisis validitas diukur dengan cara mengkorelasikan skor yang ada pada setiap item dengan skor total. Sedangkan rumus yang digunakan adalah rumus yang dikemukakan oleh Pearson dan dikenal dengan rumus korelasi *product moment* seperti berikut:

$$r_{xy} = \frac{N\sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{[N\sum X^2 - (\sum X)^2][N\sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

Kemudian kesimpulan diambil dengan cara membandingkan r hitung dan r table, sesudah itu dilakukan uji t.

Pengujian validitas instrument juga dapat dilakukan dengan bantuan komputer dengan program SPSS atau Exel. Langkah kerja uji validitas dengan program Exel adalah sebagai berikut: (Muhidin dan Abdurrahman, 2007:48-50)

1) Mengisikan semua data yang akan diuji (dari instrumen) pada lembar kerja Exel.
2) Menghitung jumlah skor yang diperoleh setiap responden dan jumlah skor tiap item dengan menggunakan rumus SUM.
3) Menghitung nilai r hitung (koefisien korelasi), menentukan nilai r tabel (nilai tabel koefisien korelasi pada derajad bebas (db)= n-2) dan membandingkan kedua nilai tersebut. Koefisien korelasinya dihitung dengan menggunakan rumus CORREL, dan valid atau tidaknya dengan rumus IF dengan membandingkan jika r hitung lebih besar (>) dari r tabel, maka item dikatakan valid dan sebaliknya jika lebih kecil.
4) Membuat rekapitulasi hasil pengujian validitas

Hasil dari uji validitas untuk setiap variabel adalah:

1. Hasil Validitas Variabel X_1 (Perilaku Supervisi Akademis)

Tabel 3.2

Hasil Uji Validasi X_1

Nomor Item	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Keterangan
1	0.338	0.433	T
2	0.625	0.433	V
3	0.776	0.433	V
4	0.816	0.433	V
5	0.691	0.433	V
6	0.629	0.433	V
7	0.593	0.433	V
8	0.463	0.433	V

9	0.485	0.433	V
10	0.707	0.433	V
11	0.476	0.433	V
12	0.476	0.433	V
13	0.573	0.433	V
14	0.573	0.433	V
15	0.691	0.433	V
16	0.509	0.433	V
17	0.714	0.433	V
18	0.819	0.433	V

Dari data tersebut disimpulkan bahwa dari 18 item instrumen, yang tidak valid adalah item no. 1 karena r hitungnya lebih kecil dari r table, sehingga no.1 tersebut perlu direvisi atau tidak digunakan untuk pengambilan data sedang item yang lain bisa digunakan.

2. Hasil Validitas Variable X_2 (Kinerja Guru)

Tabel 3.3

Hasil Uji Validasi X_2

Nomor Item	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Keterangan
10	0.044	0.433	T
11	0.628	0.433	V
12	0.658	0.433	V
13	0.755	0.433	V
14	0.835	0.433	V
15	0.855	0.433	V
16	0.047	0.433	T
17	0.796	0.433	V
18	0.764	0.433	V
19	0.788	0.433	V
20	0.880	0.433	V
21	0.742	0.433	V
22	0.693	0.433	V
23	0.586	0.433	V
24	0.398	0.433	T
25	0.522	0.433	V
26	0.761	0.433	V
27	0.737	0.433	V
28	0.643	0.433	V

29	0.676	0.433	V
30	0.752	0.433	V
31	0.789	0.433	V
32	0.732	0.433	V
33	0.733	0.433	V
34	0.378	0.433	T
35	0.545	0.433	V
36	0.647	0.433	V

Dari hasil perhitungan korelasi skor masing-masing item dengan skor total (r hitung) yang dibandingkan dengan r tabel, maka didapatkan beberapa item yang tidak valid yakni no. 10, 18, 24, dan 34 karena memiliki r hitung kecil dari r tabel. Sedangkan item no 1-9 dipisahkan sebagai data tambahan guru/responden.

3. Hasil Validitas Variabel Y (Efektivitas Sekolah/SKL)

Tabel 3.4

Hasil Uji Validasi Y

Nomor Item	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Keterangan
1	0.687	0.433	V
2	0.610	0.433	V
3	0.764	0.433	V
4	0.293	0.433	T
5	0.311	0.433	T
6	0.700	0.433	V
7	0.847	0.433	V
8	0.477	0.433	V
9	0.708	0.433	V
10	0.650	0.433	V
11	0.489	0.433	V
12	0.506	0.433	V
13	0.573	0.433	V
14	0.342	0.433	T
15	0.692	0.433	V
16	0.667	0.433	V
17	0.788	0.433	V
18	0.689	0.433	V

19	0.687	0.433	V
20	0.666	0.433	V
21	0.584	0.433	V
22	0.600	0.433	V
23	0.511	0.433	V
24	0.530	0.433	V
25	0.383	0.433	T
26	0.356	0.433	T
27	0.700	0.433	V
28	0.616	0.433	V
29	0.514	0.433	V
30	0.663	0.433	V
31	0.588	0.433	V
32	0.721	0.433	V
33	0.638	0.433	V
34	0.676	0.433	V
35	0.597	0.433	V
36	0.637	0.433	V
37	0.128	0.433	T
38	0.330	0.433	T

Jadi item yang tidak akan digunakan atau perlu direvisi karena tidak valid adalah item no.4, 5, 14, 25, 26, 37dan 38.

b. Reliabilitas Instrumen

Langkah kerja pengujian Reliabilitas adalah sebagai berikut:

1) Mengisikan semua data yang akan diuji (dari instrumen) pada lembar kerja Exel.
2) Menghitung jumlah skor yang diperoleh setiap responden dan jumlah skor tiap item dengan menggunakan rumus SUM.
3) Menghitung varians tiap item dan varians total dari jumlah skor yang diperoleh responden dengan menggunakan rumus VAR.
4) Menjumlahkan seluruh varians items

5) Membuat rekapitulasi perhitungan varians item

6) Menghitung nilai koefisien alfa dengan rumus:

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1}\right].\left[1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_t^2}\right]$$

Membuat kesimpulan dengan cara membandingkan nilai hitung koefisien alfa dan nilai tabelnya, jika nilai koefisien alfanya lebih besar (>) dari nilai tabel maka instrument dikatakan reliabel.

Hasil dari Uji Reliabilitas untuk semua variabel adalah seperti berikut:

1. Instrumen Perilaku Supervisi Akademis

Tabel 3.5

Varians Item PSA

Nomor Item	Varians
1	0.323
2	0.573
3	0.707
4	0.373
5	0.623
6	0.543
7	0.340
8	0.457
9	0.360
10	0.623
11	0.500
12	0.477
13	0.500
14	0.523
15	0.583
16	0.410
17	0.393
18	1.027
Jml var item	**9.337**
Vaians total	**59.79**

Menghitung nilai koefisien alfa

Diketahui:

k (banyak item) = 18

$\sum \sigma_i^2$ (jumlah varians semua item) = 9.337

σ_t^2 = 59.79

Dimasukkan ke dalam rumus koefisien alfa

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1}\right].\left[1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_t^2}\right]$$

Maka didapat:

Reliabilitasnya

$r_{11} = \left[\frac{18}{18-1}\right].\left[1 - \frac{9.337}{59.79}\right]$ = 0.893

r tabel = 0.396

Karena r hitungnya (0.893) lebih besar dari r tabel (0.396), maka instrumen dikatakan reliabel.

2. Instrumen Kinerja Guru (KG)

Tabel 3.6

Varians Item KG

Nomor Item	Varians
10	0.507
11	2.559
12	2.382
13	3.000
14	2.721
15	2.279
16	0.566
17	2.316
18	2.279
19	1.493
20	1.750
21	1.493
22	2.375
23	3.566
24	1.860
25	2.250
26	2.000
27	2.434
28	3.066
29	2.265
30	2.257
31	3.257
32	1.809
33	2.757
34	3.529
35	2.904
36	3.132
Jml var item	**62.809**
Varian total	**778.654**

Menghitung nilai koefisien alfa

Diketahui:

k (banyak item) = 27 (no.1-9 tidak dianalisis, untuk data diri).

$\sum \sigma_i^2$ (jumlah varians semua item) = 62.809

σ_t^2 = 778.654

Dimasukkan ke dalam rumus koefisien alfa

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1}\right].\left[1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_t^2}\right]$$

Maka didapat:

Reliabilitasnya

$r_{11} = \left[\frac{27}{27-1}\right].\left[1 - \frac{62.809}{778.654}\right]$ = 0.9547

r tabel = 0.456

Karena r hitung (0.9547) lebih besar dari r tabel (0.456), maka instrument disimpulkan reliabel.

3. Instrumen Standar Kompetensi Lulusan

Tabel 3.7

Varians Item SKL

Nomor Item	Varians
1	0.748
2	0.290
3	0.590
4	0.690
5	0.648
6	0.614
7	0.490
8	0.348
9	0.548
10	0.229
11	0.414
12	0.762
13	0.414
14	0.890
15	0.962
16	0.514
17	0.733
18	0.648
19	0.829
20	0.562
21	0.648
22	0.462
23	0.448
24	0.590
25	0.329
26	0.448
27	0.629
28	0.590
29	0.762
30	0.248
31	0.862
32	0.490
33	0.448
34	0.790
35	0.590
36	0.648

Menghitung nilai koefisien alfa

Diketahui:

k (banyak item) = 38

$\sum \sigma_i^2$ (jumlah varians semua item) = 21.757

σ_t^2 = 270.75

Dimasukkan ke dalam rumus koefisien alfa

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1}\right].\left[1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_t^2}\right]$$

Maka didapat:

Reliabilitasnya

$r_{11} = \left[\frac{38}{38-1}\right].\left[1 - \frac{21.757}{270.75}\right]$ = 0.9445

r tabel = 0.433

Karena r hitung (0.9445) lebih besar dari r tabel (0.433), maka instrument dikatakan reliabel dan bisa digunakan untuk pengambilan data.

37	0.462
38	0.390
Jml var item	**21.757**
Varian Total	**270.75**

Dari uji validitas dan reliabilitas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari tiga instrumen yang mewakili tiga variabel penelitian, ternyata ada beberapa item yang tidak valid yakni item no. 1 untuk instrumen Perilaku Supervisi Akademis (PSA), item no. 10, 18, 24, dan 34 dari instrumen Kinerja Guru (KG), dan item no. 4, 5, 14, 25, 26, 37 dan 38 dari instrumen Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Setelah melakukan konsultasi dengan pembimbing maka ada item yang direvisi yakni no. 1 dari instrumen perilaku supervisi akademis, no. 10 dan 16 dari instrumen kinerja guru, sedang item-item tidak valid yang tidak digunakan adalah item no. 24, 34 dari kinerja guru, item no. 4, 5, 25, 26, 37 dan 38 dari instrument standar kompetensi lulusan sehingga instrumen yang akan digunakan untuk pengumpulan data mengalami revisi dan pengurangan yang mengakibatkan penomorannya juga berubah.
2. Semua instrumen reliabel dan bisa digunakan untuk pengumpulan/pengambilan data penelitian/tesis.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data. Kuesioner atau instrument disebar ke 11 SMAN se Kota Jambi. Instrumen ini merupakan evaluasi diri (*self assessment*) dari kepala sekolah, pengawas sekolah dan guru senior perihal perilaku supervisi akademis; perilaku supervisi yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Instrumen ini memakai skala sikap. Data ini untuk menjawab pertanyaan deskriptif bagaimana perilaku supervisi akademis pelaku supervisi tersebut. Kuesioner lain adalah untuk mengumpulkan data mutu pembelajaran yang diukur dari kinerja guru yang disupervisi. Sedangkan kuesioner terakhir digunakan untuk mengumpulkan data tentang mutu sekolah melalui penilaian sekolah efektif dengan mengukur ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan khususnya satuan pendidikan.

E. Prosedur dan Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui makna dari data yang sudah terkumpul maka dilakukan analisis data. Prosedur yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menyeleksi data agar dapat diolah yakni dengan memeriksa jawaban responden apakah sudah sesuai dengan petunjuk dan lengkap.
2. Memberikan skor bagi instrumen yang memiliki pilihan lebih dari satu yakni instrumen kinerja guru sesuai petunjuk.
3. Memasukkan ke dalam tabel, menghitung skor total dan persentase dari ketiga variabel. Menghitung persentase dengan cara:

$$p = \frac{X}{5.n}.100\%$$

P = persentase

X = skor total

5.n = kriterium atau skor total tertinggi yakni 5 dikalikan n

N = jumlah item

4. Untuk kebutuhan analisis deskriptif maka hasil persentase kemudian dicocokkan dengan kategori dengan kriteria sebagai berikut:

   90-100% bermakna ’sangat baik’

   80-89% bermakna ’baik’

   70-79% bermakna ’cukup baik’

   60-69% bermakna ’sedang’

   50-59% bermakna ’rendah’

   49% ke bawah bermakna ’sangat rendah’

Sedangkan untuk teknik analisis, pertama dilakukan analisis deskriptif terhadap data pengukuran perilaku supervisi akademis berasal dari kepala sekolah, pengawas sekolah dan guru senior, lalu mutu proses belajar mengajar diukur dengan instrumen kinerja guru dan mutu sekolah diukur melalui efektifitas sekolah dengan instrument standar kompetensi lulusan.

Analisis deskriptif adalah merupakan kegiatan untuk menjelaskan berbagai karakteristik data sehingga gambaran dari data itu terungkap dengan jelas. Mendeskripsikan data bisa melalui tabel, grafik, diagram, persentase, frekuensi, perhitungan mean, median dan modus. Analisis deskriptif bisa

dilakukan dengan bantuan program SPSS. Hasilnya lalu dideskripsikan dan ditampilkan.

Selanjutnya dilakukan analisis inferensial termasuk di dalamnya adalah analisis korelasi dan regresi yang berfungsi untuk menjawab bagaimana korelasi atau pengaruh antar variabel seperti perilaku supervisi akademis terhadap proses belajar mengajar dan terhadap mutu pendidikan. Koefisien korelasinya dihitung dengan teknik statistik Korelasi Spearman Rank karena sumber datanya berbeda (Sugiyono, 2007: 244-245) dengan menggunakan rumus:

$$p = 1 - \frac{6 \sum {b_i}^2}{n(n^2 - 1)}$$

yang penghitungannya bisa dibantu dengan program SPSS 17.

Dalam analisis korelasi juga ada angka Koefisien Determinasi yang besarnya kuadrat dari koefisien korelasi (r^2). Koefisien ini disebut koefisien penentu, karena varians yang terjadi pada variabel dependen dapat dijelaskan melalui varians yang terjadi pada variabel independen (Sugiyono, 2007: 231).

Dan untuk menghitung regresinya akan digunakan regresi linear dan regresi ganda. Semua analisis bisa dilakukan dengan pemanfaatan program SPSS 17 dengan prosedur atau tahapan seperti berikut:

a) Koefisien Korelasi

Langkah kerja penghitungan korelasi Spearman dengan SPSS adalah sebagai berikut: (Muhidin, 2007: 119-120)

1) Siapkan lembar kerja SPSS,

2) Berikan defenisi variabel dan isikan skor masing-masing variabel,

3) Klik menu *analyze* lalu *correlate* kemudian *bivariate*.
4) Check list Correlation Coefficient Spearman pada kotak dialog,
5) Klik variabel-variabel yang akan dikorelasikan, masukkan ke kotak *Variables*,
6) Klik OK, maka akan muncul *output*.

Pengujian keberartian korelasi dapat diketahui melalui applikasi program SPSS. Kriteria yang digunakan adalah apabila nilai r lebih besar (>) dari nilai a tertentu maka H_o diterima artinya tidak terdapat hubungan yang berarti antara variabel X dan variabel Y. Sebaliknya apabila nilai r lebih kecil (<) dari nilai a tertentu maka H_o ditolak, artinya terdapat hubungan yang berarti antara variabel X dan Y (Muhidin, 2007: 131).

b) Koefisien Regresi

Analisis regresi dipergunakan untuk menelaah hubungan antara dua variabel atau lebih, terutama menelusuri pola hubungan yang modelnya belum diketahui dengan sempurna (Muhidin, 2007: 187). Langkah kerja penghitungan koefisien regresi dengan SPSS adalah seperti berikut: (Muhidin, 2007: 191-193)

1) Siapkan lembar SPSS,
2) Buat defenisi variabel dan isikan skor data masing-masing variabel,
3) Klik menu *analyze*, lalu pilih *Regression* dan *Linear*,
4) Masukkan variabel-variabel ke kotak *Dependent* dan *Independent*,

5) Pada kotak Linear Regression, klik Statistics, check list (√) Model Fit lalu Anova, check list juga Estimates pada Regression Coefficient, lalu klik Continue,
6) Pada kotak Linear Regression, klik Save lalu check list Unstandardized pada Regression Value, kemudian klik Continue,
7) Pada kotak Linear Regression juga, klik Option, tulis 0,05 pada Entry, klik Continue,
8) Klik OK pada kotak dialog Linear Regression, maka keluar output.

Keberartian regresi dapat diketahui melalui pengujian hipotesis nol, bahwa koefisien regresi b sama dengan nol (tidak berarti), melawan hipotesis tandingan bahwa koefisien arah regresi tidak sama dengan nol.

Namun seyogyanya sebelum dilakukan analisis korelasi, untuk memastikan model datanya dan statistk yang tepat maka dilakukan minimal uji normalitas, homogenitas dan linearitas data, yang ketiganya untuk memastikan asumsi parametrik. Jika asumsi tersebut tidak dipenuhi, maka digunakan analisis nonparametrik.